

**PENGARUH DANA DESA, PENGANGGURAN, BELANJA MODAL, DAN  
PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**SITI NUR KHOTIMAH  
NPM 1711021065**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRACT**

### ***THE EFFECT OF VILLAGE FUND, UNEMPLOYMENT, CAPITAL EXPENDITURE, AND EDUCATION ON POVERTY IN REGENCY IN LAMPUNG PROVINCE***

**By**

***SITI NUR KHOTIMAH***

*This research aims to analyze the effect of village funds, capital expenditures, unemployment, and education on poverty in regency in Lampung Province. This research uses panel data analysis method with Random Effect Model (REM). Using the percentage of poverty as the dependent variable and the amount of village funds, the open unemployment rate, the realization of capital expenditures, and mean years of schooling as independent variables. The results showed that there was a negative and significant relationship between village funds on poverty, and there was a positive and significant relationship between the open unemployment rate on poverty. Meanwhile, mean years of schooling and capital expenditure variables have a negative and significant effect on poverty.*

*Key words : Poverty, Village Fund, Open Unemployment Rate, Capital Expenditure, Mean Years of Schooling*

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH DANA DESA, PENGANGGURAN, BELANJA MODAL, DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**SITI NUR KHOTIMAH**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa, belanja modal, pengangguran, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dengan *Random Effect Model* (REM). Menggunakan persentase kemiskinan sebagai variabel terikat dan jumlah dana desa, tingkat pengangguran terbuka, realisasi belanja modal, dan rata – rata lama sekolah sebagai variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara dana desa terhadap kemiskinan, dan terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan. Sedangkan, variabel rata – rata lama sekolah dan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Kata kunci : Kemiskinan, Dana Desa, Tingkat Pengangguran Terbuka, Belanja Modal, Rata – Rata Lama Sekolah

**PENGARUH DANA DESA, PENGANGGURAN, BELANJA MODAL, DAN  
PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**SITI NUR KHOTIMAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA EKONOMI**

**Pada**

**Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**



Judul Skripsi : **PENGARUH DANA DESA, PENGANGGURAN,  
BELANJA MODAL, DAN PENDIDIKAN  
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI  
KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Siti Nur Khotimah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1711021065**

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



**Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**  
NIP. 19670710 199003 2 001

**MENGETAHUI**

**Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Neli Aida".

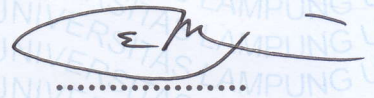
**Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.**  
NIP. 19631215 198903 2 002



**MENGESAHKAN**

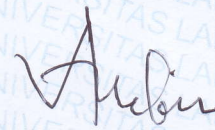
1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**



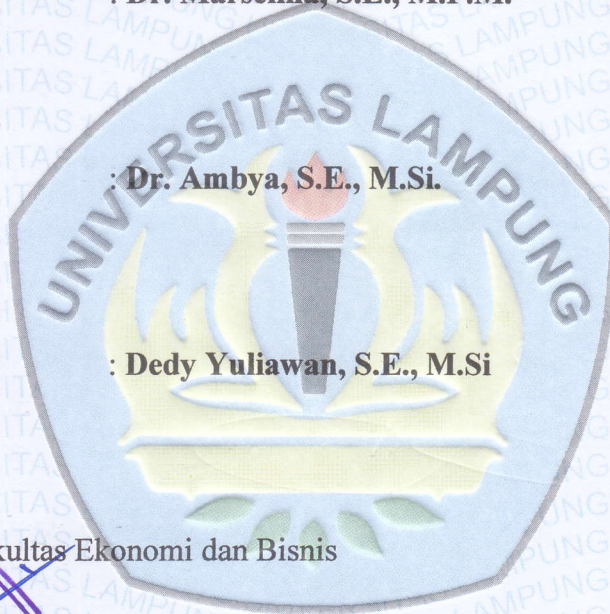
.....

Penguji I : **Dr. Ambya, S.E., M.Si.**



.....

Penguji II : **Dedy Yuliawan, S.E., M.Si**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Juli 2021**



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh – sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima konsekuensi/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Bandar Lampung, 27 Juli 2021

Penulis



Siti Nur Khotimah

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Trimurjo, Lampung Tengah pada tanggal 17 November 1999, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari Bapak Suparjo dan Ibu Sritanti.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu Taman Kanak-kanak (TK) PKK Depokrejo diselesaikan tahun 2004, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Depokrejo diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Metro diselesaikan tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Metro diselesaikan tahun 2017. Adapun ekstrakurikuler yang diikuti yaitu Pramuka dan Rohis.

Tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung di jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Kegiatan organisasi yang pernah diikuti yaitu sebagai Staff *Media Center* dan Sekretaris Biro Usaha Mandiri Rohani Islam (ROIS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, KSEI FoSEIL Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Staff Penelitian dan Pengembangan Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Lampung, Staff Departemen Syiar Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Ekonomi Indonesia (FULDFEI) Regional Sumatera, dan Sekretaris Departemen Kesekretariatan dan Masjid Bina Rohani Islam Mahasiswa (BIROHMAH) Universitas Lampung. Pada tahun 2017 dan



tahun 2019, penulis terpilih sebagai penerima dana Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Lampung.

Pada tahun 2019 penulis mengikuti kegiatan KKL (Kuliah Kunjung Lapangan) di Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, Museum Bank Indonesia, dan Studio Mata Najwa. Pada tahun 2020 penulis melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Teratas, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari, dan melaksanakan magang di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung selama 30 hari.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin puji syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW, serta berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Penulis persembahkan karya sederhana ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

Kedua orang tua penulis yang terhormat, terimakasih untuk Bapakku Suparjo dan Ibuku Sritanti. Terima kasih atas segala kasih sayang yang tak terhingga, atas pengorbanan, dan perjuangannya yang luar biasa sebagai panutan dalam hidup, serta atas doa yang selalu di langitkan di setiap langkah ikhtiar ku.

Keluarga besar, sahabat, dan teman – teman, terimakasih telah membantu dalam proses perkuliahan ku.

Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan motivasi, arahan, dan pelajaran yang luar biasa serta sangat membangun dalam proses perkuliahan dan penyelesaian karya tulis ini. Serta Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.”

(QS. Aali ‘Imraan : 139)



## SANWACANA

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin puji syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW, serta berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Dana Desa, Pengangguran, Belanja Modal, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten di Provinsi Lampung” merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran dan perhatian serta, memberikan arahan, ilmu, dan saran yang membangun kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

5. Bapak Muhammad Husaini, S.E., M.E.P. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat, bimbingan, dan arahan kepada penulis sejak semester awal hingga selesai.
6. Bapak Dr. Ambya, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan saran, arahan, dan tambahan ilmu dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dedi Yuliawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan saran, arahan, dan tambahan ilmu dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran, arahan, dan tambahan ilmu dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan: Prof. S.S.P. Pandjaitan, Pak Nairobi, Pak Heru, Pak Yoke, Pak Muhidin, Prof. Toto, Pak Wayan, Pak Ambya, Pak Husaini, Pak Imam, Pak Yudha, Pak Moneyzar, Pak Thomas, Pak Arif, Pak Dedi, Ibu Betty, Ibu Irma, Ibu Emi, Ibu Marselina, Ibu Neli, Ibu Ida, Ibu Ratih, Ibu Asih, Ibu Zulfa, serta seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Ibu Yati, Ibu Mayra, Ibu Mimi, Mas Yogi dan seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas seluruh bantuan yang selama ini diberikan kepada penulis.

11. Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Suparjo dan Ibu Sritanti yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis, terima kasih atas segala perjuangannya, kasih sayang yang luar biasa, serta nasihat yang selalu mengiringi segala ikhtiar penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah swt.
12. Kakek Yatiman, dan Nenek Ginem, Bibi Tri Nuryati, Bibi Ratna, Paman Harto, Adikku Ma'ul Adi Prasetyo, Sepupu Alya dan Fadil, Mbah Wiwik, Mba Ika, dan Umi Reni, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.
13. Keluarga Kuliah Kerja Nyata (KKN), Bapak A. Hifzon beserta keluarga, Nurvita, Yola, Catrin, Dian, Bonny, dan Gigih terima kasih sudah memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis.
14. Sahabat dan teman-teman tercinta Vellya, Duwi, Sari, Karina, Nirmala, Rahayu, Findy, Ages, Qurrota, Siti Istikomah, Indah Laras, dan Serli. Terima kasih sudah saling mengingatkan, membantu, dan berjuang bersama.
15. Teman seperjuangan Ekonomi Publik 2017 yang luar biasa, terimakasih telah berjuang bersama selama proses perkuliahan.
16. Keluarga Jurusan Ekonomi Pembangunan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kekompakkan dan kekeluargaannya.
17. Keluarga ROIS FEB, Doni, Vellya, Bambang, Duwi, Indah, Abdih, Afif, Ages, Eka, Eko, Fina, Ghaiby, Hafizd, Naqon, Qurrota, Rahayu, Ratih, Riski, Robby, Wulan, Chaniado, Arifin, dan Deni. Terimakasih sudah kebersamai



dalam berorganisasi dan pengalaman luar biasa, serta saling menguatkan dalam berdakwah.

18. Keluarga BIROHMAH Universitas Lampung, Irvan, Nida, Doni, Syarif, Indah, Cindy, Dandi, Faris, Ghaiby, Handrian, Imad, Livia, Rohadi, Imam, Neng, Qurrota, Rini, Salma, Usamah, Vellya, Widia, dan Yuyun. Terimakasih sudah kebersamai dalam berorganisasi dan pengalaman luar biasa, serta saling menguatkan dalam berdakwah.

19. Teman – teman seperjuangan aktivis dakwah kampus yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas kekeluargaanya, dan perjuangannya selama ini dalam kebersamai selama proses perkuliahan dan dalam berdakwah.

20. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini selesai. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan kritik untuk pengembangan lebih lanjut sangatlah diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan, dan do'a yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 27 Juli 2021

**Siti Nur Khotimah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	15
1.3 Tujuan Penelitian .....	16
1.4 Manfaat Penelitian .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Tinjauan Teoritis .....	17
2.1.1 Pengeluaran Pemerintah.....	17
2.1.2 Fungsi APBN .....	20
2.1.3 Transfer .....	21
2.1.4 Keuangan Daerah .....	22
2.1.5 Pendapatan Desa .....	23
2.1.6 Kemiskinan .....	27
2.1.7 Pengangguran.....	32
2.1.8 Belanja Modal .....	33
2.1.9 Pendidikan.....	34
2.2 Tinjauan Empiris.....	35
2.3 Kerangka Pemikiran.....	37
2.4 Hipotesis.....	38
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	40

3.2	Populasi dan Waktu Penelitian.....	40
3.3	Data dan Sumber Data .....	41
3.4	Definisi Operasional Variabel.....	41
3.4.1	Kemiskinan .....	41
3.4.2	Dana Desa .....	42
3.4.3	Pengangguran.....	43
3.4.4	Belanja Modal .....	43
3.4.5	Pendidikan.....	43
3.5	Metode Analisis Data.....	44
3.5.1	Simulasi dengan Menggunakan <i>Time Lag</i> .....	44
3.5.2	Analisis Regresi Data Panel .....	45
3.5.2.1	<i>Common Effect Model</i> .....	46
3.5.2.2	<i>Fixed Effect Model</i> .....	46
3.5.2.3	<i>Random Effect Model</i> .....	46
3.5.3	Uji Spesifikasi Model.....	46
3.5.3.1	Uji Spesifikasi Model dengan Uji Chow.....	46
3.5.3.2	Uji Spesifikasi Model dengan Uji Hausman .....	47
3.5.3.3	Uji Spesifikasi Model dengan Uji BG – LM Test.....	47
3.5.4	Uji Asumsi Klasik.....	48
3.5.4.1	Uji Normalitas .....	48
3.5.4.2	Uji Heteroskedastisitas .....	49
3.5.4.3	Deteksi Multikolinieritas .....	49
3.5.5	Pengujian Hipotesis.....	49
3.5.5.1	Uji t.....	49
3.5.5.2	Uji F.....	51
3.5.5.3	Pengujian Koefisien Determinasi .....	51
<b>IV.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
4.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	52
4.2	Hasil Simulasi <i>Time Lag</i> Terbaik.....	54
4.3	Hasil Uji Regresi Data Panel .....	55
4.3.1	Uji Asumsi Klasik.....	55
4.3.2	Uji Spesifikasi Model.....	57
4.3.3	Hasil Estimasi Regresi .....	59



4.3.4	Pengujian Hipotesis.....	60
4.3.4.1	Uji t-Statistik .....	60
4.3.4.2	Uji F-Statistik .....	61
4.3.4.3	Pengujian Koefisien Determinasi .....	62
4.3.5	Pembahasan Hasil Penelitian .....	62
4.3.5.5	Interpretasi Intersep Masing – Masing Kabupaten .....	75
<b>V.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
5.1	Simpulan .....	85
5.2	Saran.....	86
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>
	Tabel 19 – 33.....	96
	Gambar 9.....	99

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten Tahun 2015 – 2019 (dalam persen).....	3
2. Dana Desa di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten Tahun 2015 – 2019 (dalam ribuan rupiah).....	5
3. Besaran Perubahan Jumlah Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung pada Tahun 2015 – 2019 .....	5
4. Besaran Perubahan Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung pada Tahun 2015 – 2019 (dalam persen) .....	9
5. Belanja Modal di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten Tahun 2015 – 2019 (dalam ribuan rupiah).....	14
6. Tinjauan Empiris.....	35
7. Deskripsi Data.....	41
8. Hasil Statistik Deskriptif.....	52
9. <i>Lag Length Criteria</i> .....	54
10. Hasil Estimasi Regresi Menggunakan <i>Lag 2</i> .....	55
11. Uji Heteroskedastisitas.....	56
12. Nilai Koefisien Korelasi Antarvariabel Independen.....	57
13. Hasil Uji Chow.....	58
14. Hasil Uji Hausman.....	58
15. Hasil Uji BG – LM Test.....	59
16. Hasil Regresi <i>Random Effect Model</i> .....	60
17. Uji Signifikan.....	60
18. Nilai Intersep di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung.....	76
19. Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten Tahun 2015-2019.....	96
20. Jumlah Dana Desa di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 .....	96
21. Tingkat Pengangguran Terbuka di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 .....	97

22. Belanja Modal di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019.....	97
23. Rata – Rata Lama Sekolah di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 .....	98
24. Statistik Deskriptif .....	98
25. <i>Lag Length Criteria</i> .....	99
26. Uji Heteroskedastisitas.....	100
27. Deteksi Multikolinieritas .....	100
28. Hasil Estimasi Regresi CEM, FEM, dan REM Simulasi <i>Lag 1</i> .....	101
29. Hasil Estimasi Regresi CEM, FEM, dan REM Simulasi <i>Lag 2</i> .....	103
30. Uji Chow .....	105
31. Uji Hausman .....	106
32. Uji Breusch Pagan – Lagrange Multiplier Test .....	107
33. <i>Cross – Section Random Effect</i> .....	107



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten di Provinsi Lampung pada Tahun 2014 dan 2019 (dalam persen).....	10
2. Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2019....	13
3. Perbandingan Realisasi Belanja Modal dan Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 (dalam persen) .....	15
4. Kurva Teori Peacock dan Wiseman.....	19
5. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat Rostow Musgrave dan Peacock Wiseman .....	20
6. Dampak Transfer pada Anggaran Daerah.....	21
7. Lingkaran Kemiskinan Menurut Nurkse.....	31
8. Skema Kerangka Penelitian .....	38
9. Uji Normalitas.....	99

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah berperan penting dalam penurunan angka kemiskinan, salah satunya melalui alokasi anggaran daerah. Alokasi belanja daerah perlu dioptimalkan untuk perwujudan kesejahteraan masyarakat, salah satunya tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan antar desa. Berapa besar belanja daerah yang dialokasikan dapat digunakan sebagai dukungan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang serius dan mampu merusak pembangunan manusia. Menurut Hasanuddin et al., (2009) sumber kemiskinan di masyarakat pada dasarnya yaitu kemiskinan absolut dan struktural, serta terdapat pula kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok, yaitu ketika tingkat pendapatan seseorang lebih rendah dari garis kemiskinan. Disisi lain, terdapat pula kemiskinan kultural ditandai dengan unsur budaya disuatu daerah yang membuat masyarakat tidak bisa terlepas dari kemiskinan itu sendiri, yang cenderung sulit untuk memperbaiki taraf hidup atau bisa dikatakan sebagai mentalitas kemiskinan. Kemiskinan harus dapat dipahami secara utuh, sehingga tidak hanya berhubungan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berhubungan dengan berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan lain-lain. Menurut Soemardjan et al., (1980) kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi pada golongan masyarakat, dikarenakan adanya struktur sosial yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses sumber – sumber pendapatan yang tersedia untuk mereka. Kemiskinan struktural dapat berupa jenis pekerjaan sebagai petani/buruh tani. Masih terdapat kesenjangan pada penguasaan sumber-sumber daya ekonomi, yaitu didominasi oleh kelompok elit. Hal ini merupakan

masalah mendasar baik di daerah pedesaan atau perkotaan, yang lebih besar disebabkan oleh masalah ketimpangan struktural sehingga berdampak ke peningkatan kemiskinan.

Salah satu karakteristik yang menggambarkan perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah sektor yang menjadi sumber penghasilan utama. Profil orang miskin seringkali melekat pada mereka yang bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2018, kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian di Provinsi Lampung mencapai 57,22 persen. Sektor pertanian masih menjadi sumber utama untuk memperoleh pendapatan, sedangkan kinerja serta produktivitasnya cenderung rendah, sehingga minim memberikan tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang memadai (Badan Pusat Statistik, 2018).

Menurut Fitriani et al., (2017) salah satu contohnya adalah persoalan kemiskinan struktural yang dihadapi tidak terlepas dari terbatasnya akses masyarakat terhadap kepemilikan lahan, akses modal dan pasar, kelembagaan, serta adopsi teknologi yang masih tertinggal. Menurut Hasanuddin et al., (2009) para petani miskin ataupun buruh tidak mampu menembus struktur sosial yang ada, seperti keterikatan dengan para pemilik modal/tengkulak. Hambatan struktural lain yaitu sulitnya akses modal dari sumber modal yang disediakan oleh pemerintah (*bank*), serta struktur pasar yang cenderung hanya dikuasai oleh beberapa pihak pemilik modal atau pihak luar sehingga berpengaruh pada pendapatan masyarakat miskin yang dapat di peroleh dan kemampuan untuk mengembangkan jumlah tabungan rumah tangga serta modal menjadi relatif rendah. Akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber daya ekonomi masih terbatas, meskipun berbagai program telah dilaksanakan untuk menurunkan kemiskinan, namun program tersebut masih belum optimal dan tersendat – sendat. Berarti bahwa selain masih banyak masyarakat miskin yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta pelayanan publik yang belum terjangkau, sekaligus ditandai dengan adanya kesenjangan dalam akses dan penguasaan sumber-sumber ekonomi serta terbatasnya kontrol terhadap institusi sosial dan politik.

Akses yang terbatas di desa menyebabkan kemiskinan berpotensi meningkat. Kemiskinan daerah sebagian besar merupakan hasil agregasi dari kemiskinan pedesaan, dan merupakan masalah serius Provinsi Lampung. Pemerintah daerah Provinsi Lampung sudah membuat banyak program untuk mengentaskan kemiskinan, namun program tersebut belum dapat mengatasi masalah kemiskinan. Secara menyeluruh, jumlah kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2019 sebesar 1.063.660 jiwa. Angka kemiskinan masih tinggi, pada angka 12,62 persen pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 12,34 persen, dan tetap dominan di daerah pedesaan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin pedesaan di Provinsi Lampung sebesar 14,27 persen pada Maret 2019 dan turun menjadi 13,96 persen pada September 2019, sedangkan perkotaan sebesar 8,60 persen pada September 2019.

Tabel 1. Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten Tahun 2015 – 2019  
(dalam persen)

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019
Lampung Barat	14,18	15,06	14,32	13,54	12,92
Lampung Selatan	16,27	16,16	15,16	14,86	14,31
Lampung Tengah	13,3	13,28	12,9	12,62	12,03
Lampung Utara	23,2	22,92	21,55	20,85	19,9
Lampung Timur	16,91	16,98	16,35	15,76	15,24
Tanggamus	14,26	14,05	13,25	12,48	12,05
Tulang Bawang	10,25	10,2	10,09	9,7	9,35
Way Kanan	14,61	14,58	14,06	13,52	13,07
Pesawaran	17,61	17,31	16,48	15,97	15,19
Pringsewu	11,8	11,73	11,3	10,5	10,15
Mesuji	8,2	8	7,66	7,55	7,47
Tulang Bawang Barat	8,23	8,4	8,11	8,1	7,75
Pesisir Barat	15,81	15,91	15,61	14,98	14,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2015-2019

Salah satu aspek penyebab kemiskinan adalah buruknya akses di desa, dan terhambatnya penyaluran dana pembangunan di desa oleh pemerintah pusat. Salah satu upaya pemerintah untuk memberantas kemiskinan melalui adanya transfer dana desa. Meskipun diketahui bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Terlihat bahwa sumber – sumber pendapatan desa yang dialokasikan sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada dana desa yang nilainya relatif besar dan peruntukannya jelas yaitu langsung ke desa. Selain itu, karena program Dana Desa adalah program baru di Indonesia dan program pertama dan terbesar di dunia serta belum banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat implementasi dari dana desa (Ambya, 2020). Program Dana Desa difokuskan untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan prioritas dari penggunaan dana desa selain untuk peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat, sehingga harus mampu mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema alokasi anggaran dari pemerintah pusat kepada desa. Saat ini, program dana desa telah berjalan 6 (enam) tahun sejak pertama kali dikeluarkan pada tahun 2015.

Persentase Dana Desa dalam APBN sebesar 10 persen dari Dana Transfer Daerah secara bertahap. Pada tahun 2020, porsi penyaluran dana desa sebesar 40 persen (tahap I), 40 persen (tahap II), dan 20 persen (tahap III). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp97.735.184.900 pada tahap I, sedangkan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp72 triliun diperuntukkan 74.953 desa dan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Rata-rata setiap desa akan memperoleh Dana Desa sebesar Rp960,6 juta dan nilai ini diketahui meningkat dari rata-rata tahun sebelumnya sebesar Rp933,9 juta. Jumlah dana desa di Provinsi Lampung pada tahun 2019 sebesar Rp2.427.111.117.000 dan telah disalurkan ke 2.435 desa, dengan jumlah desa paling banyak menerima dana desa berada di Lampung Tengah yaitu 301 desa.

Tabel 2. Dana Desa di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten Tahun 2015 – 2019 (dalam ribuan rupiah)

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
Lampung Barat	36.292.903	74.098.840	94.377.902	80.741.195	127.188.856
Lampung Selatan	73.656.914	144.803.840	184.433.152	157.784.320	261.327.894
Lampung Tengah	84.410.047	170.257.640	216.853.042	185.519.845	309.099.745
Lampung Utara	65.563.245	131.228.480	167.142.544	142.992.040	248.160.049
Lampung Timur	76.156.736	149.328.960	190.196.688	162.715.080	273.707.506
Tanggamus	81.744.367	169.126.360	215.412.158	184.287.155	293.682.614
Tulang Bawang	41.463.133	83.149.080	105.904.974	90.602.715	132.914.182
Way Kanan	61.098.757	125.006.440	159.217.682	136.212.245	183.883.610
Pesawaran	41.542.850	81.452.160	103.743.648	88.753.680	155.640.921
Pringsewu	34.831.337	71.270.640	90.775.692	77.659.470	129.567.419
Mesuji	29.397.590	59.392.200	75.646.410	64.716.225	101.767.947
Tulang Bawang Barat	26.394.427	52.604.520	67.001.106	57.320.085	89.161.665
Pesisir Barat	32.175.347	65.614.240	83.571.272	71.496.020	121.008.709
Jumlah	684.727.653	1.377.333.400	1.754.276.270	1.500.800.075	2.427.111.117

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015-2019

Pada Tabel 2. terlihat bahwa jumlah dana desa mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2018. Adanya peningkatan dana desa sebagai salah satu sarana untuk mengurangi tingkat kemiskinan, apabila dialokasikan pada pos-pos yang tepat.

Tabel 3. Besaran Perubahan Jumlah Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung pada Tahun 2015 – 2019

Tahun	Dana Desa (ribuan rupiah)	$\Delta$ Dana Desa (ribuan rupiah)	Kemiskinan (persen)	$\Delta$ Kemiskinan (persen)
2015	684.727.653	-	14,35	-
2016	1.377.333.400	692.605.747	14,29	-0,06
2017	1.754.276.270	376.942.870	13,69	-0,60
2018	1.500.800.075	-253.476.195	13,14	-0,55
2019	2.427.111.117	926.311.042	12,62	-0,52

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik, 2015-2019

Pada Tabel 3. menunjukkan bahwa secara keseluruhan antara jumlah dana desa dan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung menunjukkan hubungan yang negatif, artinya setiap kenaikan dana desa diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Namun, pada tahun 2018 dana desa mengalami penurunan sebesar Rp253.476.195, sedangkan tingkat kemiskinan tetap menurun secara konsisten.



Hal ini dikarenakan pemerintah lebih memprioritaskan ke desa yang memiliki banyak penduduk miskin. Desa yang sebelumnya memperoleh dana desa namun karena penduduknya sudah memiliki peningkatan kemampuan ekonomi, maka kebijakan penyaluran dana desa diprioritaskan kepada desa – desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi.

Kebijakan transfer ke daerah diberlakukan sebagai implikasi dari otonomi daerah. Hal ini disampaikan juga dalam Sari & Faisal (2017) bahwa konsekuensi logis dari otonomi daerah berdampak pada kebijakan transfer dana dari pemerintah daerah ke pemerintah desa sebagai wujud komitmen negara kepada desa, terutama dalam hal memperjelas fungsi, kewenangan, dan memperkuat status desa dan masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka telah dirumuskan kebijakan dalam rangka pengaturan desa yang tercermin dalam Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Saat ini, pemerintah Indonesia melalui nawacita memberi komitmen dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kementerian Keuangan, 2017).

Dana Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Oleh karena itu, transfer dana desa merupakan salah satu alat yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan desa, seperti saat ini terdapat banyak program pembangunan yang menekankan pada efisiensi. Dengan demikian, dana desa harus tersedia dan didorong juga oleh dana transfer lainnya untuk mendanai kewenangan desa yang mengutamakan pada program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Arham & Payu, 2020).

Desa berpotensi memunculkan masalah kemiskinan, dan fenomena ini akan selalu menjadi prioritas suatu negara yang harus dicarikan solusi dan alternatif terbaik untuk mengatasinya. Terutama yang menjadi pokok persoalan adalah kemiskinan

mampu menghambat pembangunan ekonomi, sehingga berdampak negatif terhadap kemajuan suatu daerah. Jika masih ada penduduk miskin, perlu evaluasi kembali strategi pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat (Sunu & Utama, 2019). Kemiskinan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, masih terdapat sebagian besar masyarakat yang tetap miskin (Todaro, 2003).

Hadirnya dana desa sebagai upaya untuk membantu mengurangi kemiskinan suatu daerah melalui perbaikan ekonomi pada taraf desa, maka pemerintah dapat meningkatkan belanja pemerintah untuk membangun fasilitas pedesaan, pemberdayaan, dan pemanfaatan potensi desa sebagai sarana meningkatkan kemajuan ekonomi disuatu daerah, dan hal ini yang menjadi harapan suatu negara pada setiap tahun khususnya Provinsi Lampung. Menurut Setianingsih (2017) adanya kenaikan alokasi dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan jumlah penduduk miskin. Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan masih menjadi perdebatan dikalangan peneliti yaitu berdasarkan hasil penelitian dari Lalira et al., (2018) menunjukkan bahwa dana desa tidak signifikan secara statistik, terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan, menurut Arham & Payu (2020) bahwa Transfer Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan pedesaan.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatra dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 8.447.737 jiwa dan jumlah penduduk miskin sebesar 1.063.660 jiwa atau >12 persen dari penduduk Provinsi Lampung adalah penduduk miskin. Adapun jumlah penduduk miskin terbanyak dari tahun 2015 – 2019 berada di Kabupaten Lampung Timur dengan nilai rata-rata sebesar 166,438 jiwa. Secara umum, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dengan adanya berbagai faktor yang mampu menurunkan kemiskinan, salah satunya melalui peningkatan transfer dana desa, yang ditunjukkan pada Tabel 3. Hal ini menunjukkan terdapat informasi bahwa dana desa dapat menjadi salah satu alternatif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di suatu daerah, indikasi ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Astuti (2014) diperoleh

bahwa alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kepala keluarga miskin. Namun, jumlah penduduk miskin belum dapat turun secara signifikan, masih besarnya faktor-faktor yang berpotensi memunculkan lumbung kemiskinan.

Memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan, hal ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dana desa dengan sebaik – baiknya, sebagaimana fungsinya dalam memberdayakan masyarakat. Menurut Arham & Hasan (2017), bahwa transfer dana desa memberikan konsekuensi bagi pemerintah desa agar dapat menyusun perencanaan, baik perencanaan pembangunan maupun perencanaan anggaran atau APBDes sebagai formula untuk mendesain perencanaan secara terstruktur, sebab selama ini pemerintahan desa belum mencanangkan penyusunan perencanaan yang baik, dan penganggaran yang terpola. Berdasarkan penelitian Arham & Hatu (2020), bahwa dana desa berperan penting dalam menekan angka kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan dana desa yang dialokasikan dapat mencapai isi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) huruf c yang menegaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan; melakukan pemutakhiran data kemiskinan; melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja; menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*). Namun demikian, efektivitas perbaikan kondisi masyarakat belum terlihat, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas program – program yang dicanangkan sebagai bentuk realisasi dari transfer dana desa terhadap kemiskinan pada kabupaten di Provinsi Lampung.

Implementasi dana desa akan diwujudkan melalui berbagai program pemerintah desa yang diprioritaskan untuk memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat desa. Tentunya program yang dicanangkan melalui dana desa diharapkan dapat

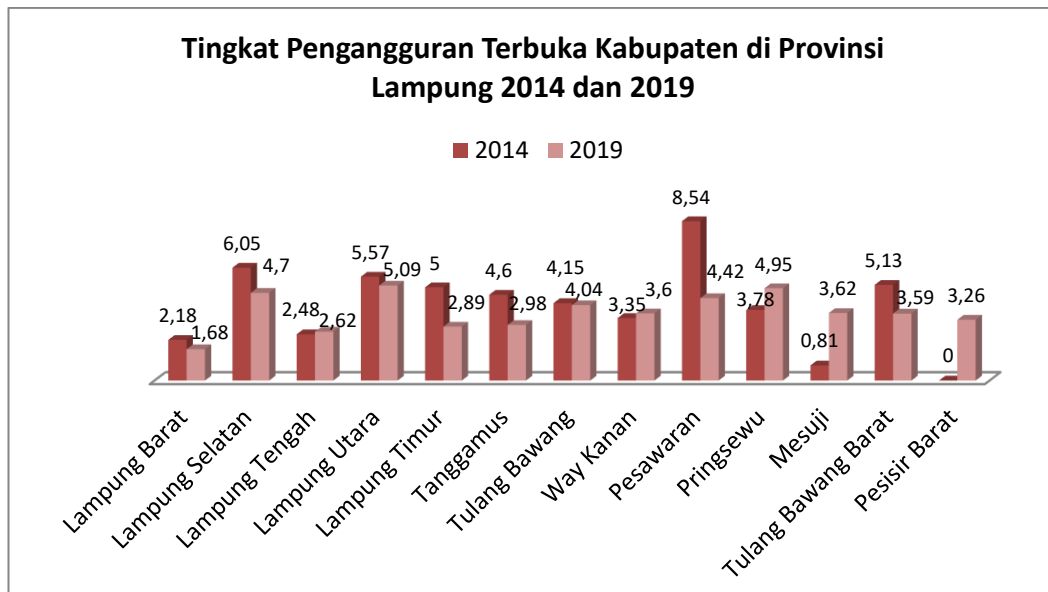
meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mengurangi jumlah pengangguran, sebab kelompok pengangguran cenderung mengalami kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 jumlah penduduk menganggur terbanyak berada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 5,09 persen dari total jumlah penduduknya. Aspek ketenagakerjaan sebagai faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kemiskinan, indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Lampung tahun 2019 mengalami penurunan yang tipis yaitu berada pada angka 4,03 persen sedangkan persentase kemiskinan tahunan mengalami penurunan yang konsisten dengan angka 12,62 persen. Angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki tingkat pengangguran yang rendah sedangkan angka kemiskinan masih tinggi, sehingga terlihat ada informasi lain yang dapat ditunjukkan yaitu indikasi terdapat fenomena pekerja miskin atau oleh *International Labour Organization* (ILO) disebut sebagai *working poor*, yaitu fenomena angkatan kerja yang sudah bekerja namun hidup dibawah garis kemiskinan. Kondisi ini perlu perhatian khusus oleh pemerintah melalui kebijakan – kebijakan, diantaranya melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan desa melalui dana desa, mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain.

Tabel 4. Besaran Perubahan Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung pada Tahun 2015 – 2019 (dalam persen)

Tahun	Pengangguran	$\Delta$ Pengangguran	Kemiskinan	$\Delta$ Kemiskinan
2015	5,14	-	14,35	-
2016	4,62	-0,52	14,29	-0,06
2017	4,33	-0,29	13,69	-0,60
2018	4,06	-0,27	13,14	-0,55
2019	4,03	-0,03	12,62	-0,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2015-2019

Pada Tabel 4. menunjukkan bahwa secara keseluruhan antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung menunjukkan arah yang sama, artinya setiap penurunan jumlah pengangguran diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Namun, persentase kemiskinan masih menunjukkan nilai yang tinggi daripada persentase pengangguran.



Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten di Provinsi Lampung pada tahun 2014 dan 2019 (dalam persen)

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, diolah*

Pada Gambar 1. menunjukkan bahwa secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebelum ada dana desa pada tahun 2014 lebih tinggi dari TPT tahun 2019 setelah adanya dana desa. Melalui diagram ini mengindikasikan bahwa perlunya dana transfer pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran, karena pengangguran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Hal ini didukung oleh penelitian dari Retnowati & Harsuti (2017), menemukan bahwa tingkat kemiskinan sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi, dimana peningkatan pengangguran menyebabkan peningkatan kemiskinan.

Faktor lain yang termasuk dalam mata rantai kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan, yang menjadi titik mendasar untuk mengurai masalah kemiskinan. Secara konsep, bahwa masyarakat miskin memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang memadai bagi anggota keluarganya. Tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat, sehingga penghasilan yang diperoleh belum optimal sebab hanya dengan tenaga fisik tanpa diiringi dengan keterampilan yang memadai. Hal ini menimbulkan ketidakmampuan untuk mengembangkan diri dan ekonomi keluarga. Dengan demikian, pendidikan

menjadi salah satu indikator dan upaya mendasar individu untuk meningkatkan kualitas hidup, sehingga diharapkan semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik (2019), tingkat pendidikan tenaga kerja di Provinsi Lampung belum terdapat peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Para pekerja di sektor informal umumnya memiliki pendidikan yang rendah dan belum mempunyai keterampilan khusus. Metode baru yang digunakan sebagai indikator dimensi pendidikan adalah rata – rata lama sekolah. Rata – rata lama sekolah masyarakat Provinsi Lampung pada tahun 2019 sebesar 7,92 tahun dan pada tahun 2015 sebesar 7,56 tahun, berarti bahwa masyarakat usia 25 tahun ke atas rata – rata mampu menikmati pendidikan sampai ke kelas 2 jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau putus sekolah di kelas 3 SMP, masalah seperti ini rentan meningkatkan jumlah pekerja anak. Hal ini mengindikasikan bahwa program wajib belajar 9 tahun belum memberikan hasil yang diharapkan, disebabkan karena rendahnya kemampuan untuk membiayai pendidikan dan rendahnya standar hidup orang – orang miskin. Sejalan dengan teori Todaro & Smith (2011) bahwa ketika orang – orang berpendapatan rendah (baik mereka sangat miskin atau tidak) umumnya tidak berdaya untuk menyediakan pendidikan bagi anggota keluarganya dengan baik, sehingga memiliki keterbatasan untuk memperoleh akses ke pendidikan.

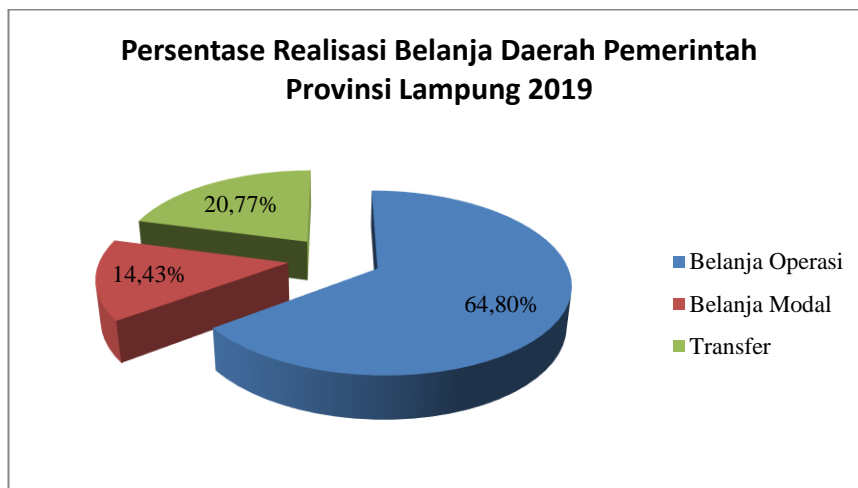
Teori lingkaran setan kemiskinan yang disampaikan Nurkse (1953) menunjukkan bahwa keterbelakangan merupakan hal yang harus diputus untuk mengatasi kemiskinan di masyarakat, dan salah satunya dapat diatasi melalui pendidikan yang berkualitas. Menurut Todaro & Smith (2011), pendidikan merupakan *input* bagi fungsi produksi nasional dalam perannya sebagai komponen modal manusia (*human capital*) atau investasi produktif dalam sumber daya manusia. Pendidikan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan secara lebih luas, sehingga menurunkan keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap berbagai aspek lainnya. Pendidikan mampu meningkatkan pemahaman tentang



keterampilan tertentu, cara bekerja demi memperoleh hasil yang baik, dan kemampuan untuk berorganisasi, serta kemampuan memanfaatkan peluang seiring ekonomi tumbuh. Namun, hal ini perlu diiringi dengan intervensi pemerintah melalui kebijakan yang diarahkan pada ketersediaan peluang masyarakat miskin dalam memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Secara umum, masalah kemiskinan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mengentaskannya. Salah satunya, dengan mengoptimalkan alokasi belanja daerah kepada pos – pos pengeluaran yang lebih produktif, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pelayanan publik yang memadai. Salah satu alokasi anggaran tersebut yaitu belanja modal, sebagai instrumen yang digunakan untuk menstimulus kinerja ekonomi (Mukarramah et al., 2019). Menurut Susilowati et al., (2017) belanja modal berhasil dan efektif sebagai solusi mengurangi tingkat kemiskinan, namun Mukarramah et al., (2019) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dikarenakan adanya program – program pemerintah yang belum tepat sasaran serta belum berhasil untuk menurunkan kemiskinan. Program yang dicanangkan belum mampu menyentuh pada masalah dasar masyarakat dan dinilai masih bersifat reaktif, berjangka pendek, dan parsial. Belanja modal harus mempunyai manfaat lebih dari satu periode, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, belanja badan layanan umum, dan belanja lainnya. Belanja modal kabupaten di Provinsi Lampung diasumsikan untuk belanja pada sektor publik yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut Putro et al., (2018) secara teori bahwa investasi memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan membuka kesempatan kerja, sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional dan kemakmuran masyarakat. Maka, diharapkan kemiskinan dapat menurun seiring dengan peningkatan belanja modal, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih menjangkau seluruh masyarakat agar masyarakat tidak terbatas dalam penguasaan sumber – sumber ekonomi yang tersedia bagi mereka.

Salah satu faktor pendorong kegiatan ekonomi daerah yaitu infrastruktur jalan, adanya ketersediaan akses transportasi memudahkan mobilitas orang dan barang dalam kegiatan ekonomi, sehingga menjadi lebih efisien. Panjang jalan rusak berat pada tahun 2019 paling banyak terdapat di Kabupaten Lampung Timur sebesar 727,4 km, maka belanja modal dapat diprioritaskan pada belanja bidang infrastruktur baik berupa jalan, irigasi, maupun jaringan. Adanya belanja modal diharapkan dapat membantu mengoptimalkan pelayanan publik terhadap pembangunan ekonomi agar bisa memicu tumbuhnya kegiatan – kegiatan ekonomi baru didaerah serta memudahkan akses menuju pusat – pusat ekonomi, maka untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan dukungan anggaran yang memadai.



Gambar 2. Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2019

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, diolah*

Pada Gambar 2. menunjukkan bahwa persentase realisasi belanja daerah tahun 2019 pada gambar diatas dihasilkan dari perbandingan total realisasi belanja dengan total belanja keseluruhan. Terlihat persentase belanja modal sebesar 14,43 persen menurun dari tahun sebelumnya yaitu 22,94 persen. Belanja modal sebagai belanja yang berpotensi dapat menggerakkan perekonomian, yang dalam beberapa tahun terakhir realisasinya lambat. Nilai ini mengindikasikan bahwa persentase realisasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan fisik infrastruktur masih diperlukan perbaikan dan ditingkatkan lagi. Hal ini dikarenakan pembangunan fisik infrastruktur dapat mempermudah akses yang dapat meningkatkan

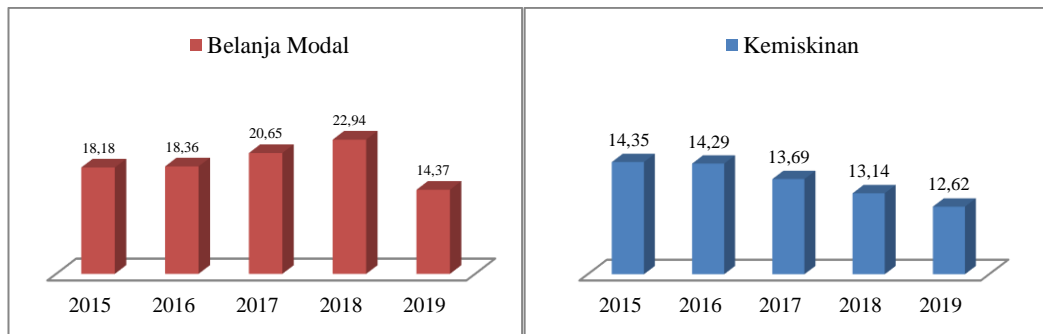
produktivitas kegiatan ekonomi, sehingga diharapkan dapat berdampak pada penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Shiffa & Raja, 2020).

Tabel 5. Belanja Modal di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten Tahun 2015 – 2019 (dalam ribuan rupiah)

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
Lampung Barat	302.606.112,52	310.063.000	348.669.021,81	290.210.246,28	220.878.333,55
Lampung Selatan	342.441.283,39	470.122.000	539.655.355,21	383.352.881,96	374.849.892,71
Lampung Tengah	309.313.410,78	422.942.000	454.948.982,53	372.907.489,49	347.461.051,83
Lampung Utara	289.834.333,62	348.791.000	399.975.479,97	193.419.766,71	120.762.726,60
Lampung Timur	255.907.955,83	364.083.000	321.795.859,20	285.430.669,67	204.551.856,45
Tanggamus	219.311.391,98	227.981.000	248.756.394,92	172.288.692,88	241.692.701,03
Tulang Bawang	271.690.077,13	321.622.000	255.811.217,54	230.920.819,35	137.579.608,31
Way Kanan	82.337.788,82	277.837.000	356.898.424,72	465.984.737,87	297.966.565,13
Pesawaran	209.321.929,16	341.676.000	327.545.967,01	331.911.625,55	196.558.843,88
Pringsewu	232.350.914,56	285.909.000	275.362.556,87	210.461.061,23	188.979.432,22
Mesuji	158.523.550,17	195.512.000	168.470.345,71	240.570.374,86	215.958.059,15
Tulang Bawang Barat	290.889.388,14	304.283.000	296.453.517,91	381.114.574,62	269.914.779,20
Pesisir Barat	221.869.723,73	330.561.000	314.242.247,26	229.701.445,86	177.051.033,94

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015-2019

Pada Tabel 5. menunjukkan realisasi belanja modal untuk kabupaten di Provinsi Lampung pada tahun 2015 – 2019 menunjukkan *trend fluktuatif*. Realisasi belanja modal terbesar berada di Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai rata-rata sebesar Rp422.084.282.653, dikarenakan pada tahun 2017 Kabupaten Lampung Selatan menyerap belanja modal cukup besar. Sedangkan, realisasi belanja modal terendah berada di Kabupaten Mesuji dengan rata-rata sebesar Rp195.806.865.976, untuk tahun 2019 realisasi anggaran belanja lebih banyak dialokasikan pada belanja barang dan jasa sebesar Rp219.147.762.719 sedangkan belanja modal sebesar Rp215.958.059.150.



Gambar 3. Perbandingan Realisasi Belanja Modal dan Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 (dalam persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, diolah

Pada Gambar 3. menunjukkan bahwa secara keseluruhan antara persentase belanja modal dan persentase kemiskinan di Provinsi Lampung menunjukkan hubungan yang negatif, artinya setiap kenaikan belanja modal diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Namun, pada tahun 2019 belanja modal menurun jauh dibanding tahun sebelumnya, sedangkan persentase kemiskinan tetap menurun secara konsisten. Hal ini dikarenakan belanja operasi mendominasi pengeluaran pemerintah sebesar 64,80 persen sesuai pada Gambar 2. besarnya belanja operasi didukung oleh belanja bantuan sosial dan belanja pegawai, sehingga realisasi anggaran lebih banyak dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin daripada kegiatan pembangunan fisik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap alokasi anggaran belanja dikarenakan belanja modal memiliki sumbangsih untuk menurunkan kemiskinan pada empat tahun terakhir periode analisis.

## 1.2 Rumusan Masalah

Menurut Kementerian Keuangan (2017), dana desa diharapkan dapat berdampak positif bagi peningkatan kemandirian desa. Dana desa sebagai salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Namun faktanya bahwa dana desa terus di gulirkan tetapi kemiskinan masih tinggi, sehingga hal ini masih menimbulkan pro dan kontra. Penelitian ini mendorong peneliti untuk mengetahui sesungguhnya apa faktor yang menyebabkan kemiskinan didaerah dapat dikurangi dan apakah dana desa menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan atau menurunkan angka kemiskinan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas diketahui tujuan penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Menganalisis pengaruh dana desa, pengangguran, belanja modal, dan pendidikan secara parsial terhadap kemiskinan di seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019.
- 1.3.2 Menganalisis pengaruh dana desa, pengangguran, belanja modal, dan pendidikan secara bersama – sama terhadap kemiskinan di seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat:

#### **1.4.1 Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan menambah bahan referensi dan khazanah ilmu pengetahuan bagi penelitian – penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu khususnya tentang dana desa.

#### **1.4.2 Bagi Masyarakat Luas**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa.

#### **1.4.3 Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai efektifitas aliran transfer dana desa dan belanja modal yang telah dialokasikan, dan diharapkan dapat dijadikan pertimbangan serta masukan dalam menentukan kebijakan pembangunan selanjutnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Teoritis

#### 2.1.1 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan semua pengeluaran kas daerah yang berlaku. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, diantaranya :

##### 2.1.1.1 Model Pembangunan *Rostow* dan *Musgrave*

Model ini menggambarkan hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap – tahap pembangunan ekonomi, diantaranya yaitu tahap awal perkembangan ekonomi, pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi terhitung besar, karena pemerintah harus menyediakan segala prasarana seperti prasarana kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya. Pada tahap berikutnya peranan investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Adanya campur tangan swasta menimbulkan kegagalan pasar, sehingga pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak, tahap ini disebut sebagai tahap menengah pembangunan ekonomi. Tahap terakhir yaitu tahap ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran – pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan, menurut Musgrave, suatu proses pembangunan diketahui dengan adanya persentase investasi swasta terhadap GNP semakin besar daripada persentase investasi pemerintah (Mangkoesebroto, 1995).



Menurut Jaelani (2018), model pembangunan Rostow dan Musgrave ini memberikan kerangka dasar bagi peningkatan pengeluaran pemerintah seiring dengan peranan pemerintah yang semakin besar. Meskipun dikembangkan berdasarkan riwayat pembangunan dari berbagai negara namun terdapat ketidakjelasan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara bertahap atau tahapan tersebut berlangsung simultan dan bersamaan.

#### 2.1.1.2 Hukum Wagner Mengenai Perkembangan Aktivitas Pemerintah

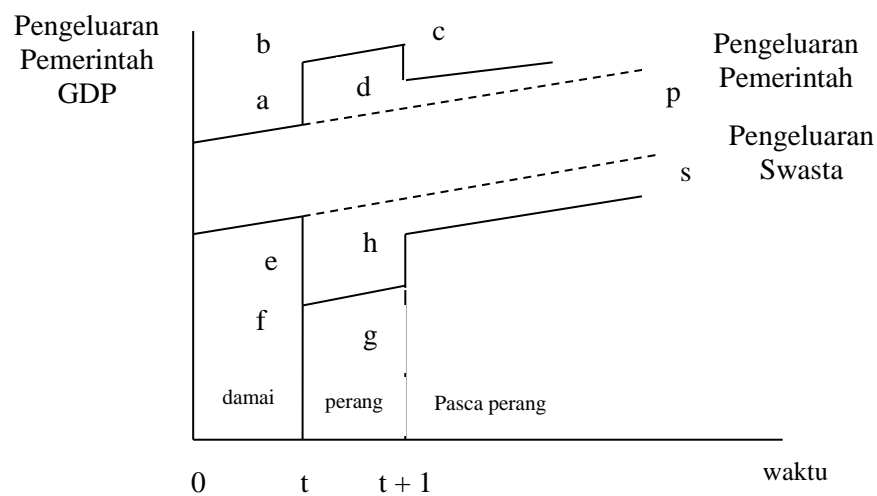
Jaelani (2018), Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Menurut Musgrave, kondisi demikian disebut sebagai "*law of growing public expenditures*". Peningkatan ini terletak pada kegiatan dan kebutuhan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah dan penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah. Hukum Wagner menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kegiatan – kegiatan pemerintah, semakin meningkatnya kebutuhan pemerintah, dan pengeluaran negara.

Hukum Wagner memberikan asumsi bahwa ada hubungan positif antara pendapatan per kapita dengan pengeluaran pemerintah. Selain itu, didasarkan pada pengamatan empiris dari negara – negara maju, namun berpotensi menimbulkan kegagalan pasar dan eksternalitas karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang – barang publik. Pandangan ini didasarkan pada teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang berifat independen, terlepas dari anggota masyarakat lainnya (Mangkoesoebroto, 1995).

#### 2.1.1.3 Teori Peacock & Wiseman

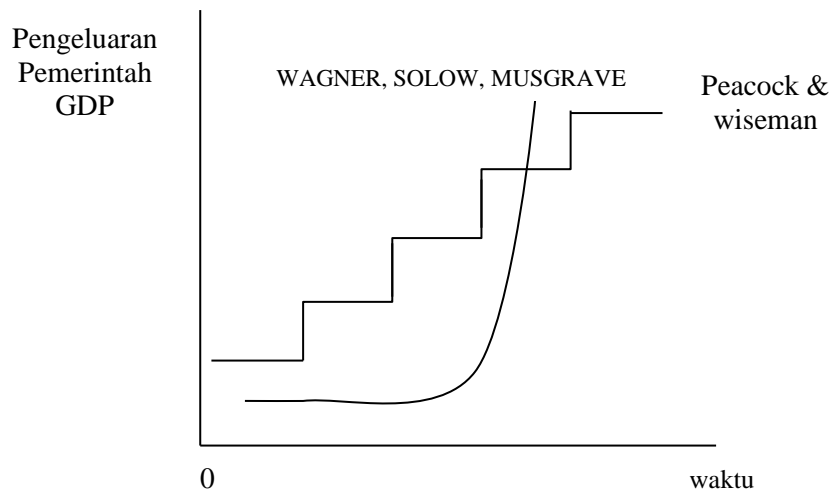
Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Jaelani (2018), meskipun demikian didalam teori ini juga dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya

pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Dalam keadaan normal, meningkatnya produk domestik bruto menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Jadi, berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi seperti tangga (Mangkoesoebroto, 1995).



Gambar 4. Kurva Teori Peacock dan Wiseman.  
 Sumber: Mangkoesoebroto, 1995.

Secara grafik, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman bukanlah berpola seperti kurva mulus berslope positif sebagaimana tersirat dalam pendapat Rostow dan Musgrave. Melainkan berslope positif dengan bentuk patah-patah seperti tangga.



Gambar 5. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat Rostow Musgrave dan Peacock Wiseman.

Sumber: Mangkoesobroto, 1995

Teori Peacock dan Wiseman mendapat kritik oleh Bird. Bird menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pengeluaran pemerintah. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan sosial, persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB akan menurun secara perlahan – lahan kembali ke keadaan normal. Jadi menurut Bird, efek pengalihan ini hanya berdampak dalam jangka pendek saja (Mangkoesobroto, 1995).

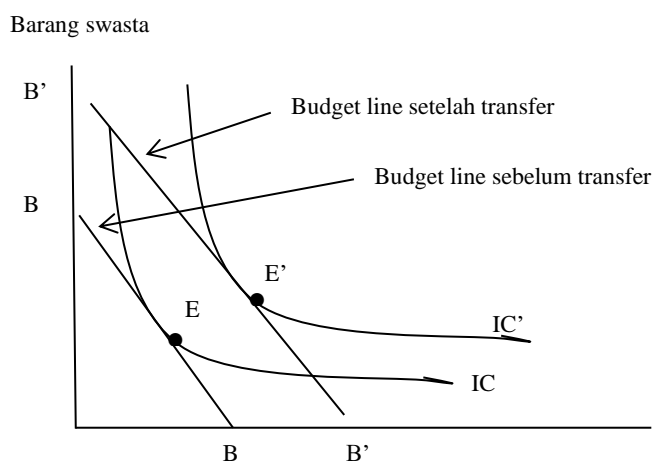
### 2.1.2 Fungsi APBN

Berdasarkan Kementerian Keuangan (2014), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan cermin arah dan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan amanat dari Undang – Undang Dasar 1945. Keseluruhan kerangka APBN menggambarkan kinerja kebijakan fiskal, kondisi keuangan, kesinambungan fiskal serta akuntabilitas pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Adanya fungsi tersebut mengharapkan bahwa kebijakan fiskal yang disampaikan dapat berjalan dengan tepat, efisien dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa fungsi APBN diantaranya yaitu fungsi alokasi, dalam hal ini anggaran dibagi secara proporsional dalam mengalokasikan pembangunan dan pemerataan. Anggaran negara harus terarah untuk menurunkan pengangguran dan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta meningkatkan nilai tambah perekonomian. Sedangkan, untuk fungsi distribusi dalam APBN harus dapat menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan besaran alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan fungsi ini dapat mencapai tujuan pembangunan dalam hal pemerataan antar wilayah dan daerah dan tentunya kebijakan dalam anggaran harus memerhatikan aspek ketelitian agar dana yang disalurkan dapat mencapai rasa keadilan. Terakhir adalah fungsi stabilisasi, yang mengindikasikan bahwa anggaran negara harus dapat menjaga keseimbangan antara masyarakat, melalui intervensi untuk mencegah terjadinya inflasi. Tanpa intervensi maka gangguan disatu sektor akan mempengaruhi sektor lain yang nantinya berpengaruh pada stabilisasi ekonomi.

### 2.1.3 Transfer

Menurut Kusuma (2017) konsep desentralisasi fiskal bertujuan untuk menyesuaikan prinsip – prinsip pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada pemerintah daerah yang sebagian dibiayai oleh anggaran nasional yang ditetapkan dalam dana transfer. Kewenangan untuk mengelola dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan untuk mempercepat pembangunan daerah berdasarkan karakter dan kebutuhan masing – masing.



Gambar 6. Dampak Transfer pada Anggaran Daerah.  
Sumber : Hendra Kusuma, 2017

Gambar 6. menggambarkan dampak transfer pada struktur fiskal daerah. Sesuai dengan konsep teori konsumsi yaitu tingkat kepuasan atas barang dan jasa meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan, hal ini digambarkan dengan oleh pergeseran garis anggaran. Maka, belanja daerah terutama pada barang publik dan swasta dapat ditingkatkan bila ada perubahan positif dalam fiskal daerah. Keuangan daerah karena adanya dana transfer digambarkan oleh garis anggaran yang sebelumnya di garis BB bergeser ke garis B'B'. Sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pengeluaran untuk menyediakan berbagai barang publik. Pergeseran pada E ke garis E' menunjukkan pergeseran tingkat pengeluaran pada kombinasi antara barang publik dan swasta.

#### **2.1.4 Keuangan Daerah**

##### **2.1.4.1 Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut Kementerian Keuangan (2018), Keuangan Daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah memuat hak daerah dan kewajiban daerah. Hak daerah merupakan segala sesuatu yang secara hukum adalah milik daerah dan juga milik pemerintah. Sedangkan, kewajiban daerah berupa segala sesuatu yang harus dilaksanakan terkait dengan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab nya. Akan menjadi bagian dari keuangan daerah apabila hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai dengan uang.

##### **2.1.4.2 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Otonomi daerah membawa suatu kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan keuangan daerahnya dengan lebih baik (Mizkan et al., 2015). Dalam Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan daerah harus transparan yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas

dalam pertanggungjawaban publik juga sangat diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Arham & Hatu (2020) bahwa untuk tingkat pemerintah daerah khususnya pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas perangkat desa melalui lokakarya, pendidikan bagi kepala desa, dan pelatihan untuk mengatasi masalah tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola keuangan di pedesaan.

### **2.1.5 Pendapatan Desa**

Menurut Kementerian Keuangan (2018), diperlukan peran pemerintah untuk menciptakan kestabilan dalam perekonomian, terutama dalam upaya meningkatkan belanja pemerintah. Salah satunya yaitu pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi anggaran yang terdapat didalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut akan di alokasikan ke berbagai bidang yang menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan diantaranya yaitu :

#### **2.1.5.1 Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha desa; hasil aset; swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan pendapatan asli desa lainnya.

#### **2.1.5.2 Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten, yang terdiri atas dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota.

#### **2.1.5.3 Pendapatan Lainnya**

Pendapatan lainnya bersumber dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran

sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.

Terdapat berbagai bentuk prioritas pemerintah dalam alokasi anggaran, namun yang menjadi fokus utama dalam penelitian adalah salah satu bagian dari pendapatan transfer yaitu dana desa. Untuk menjamin berlangsungnya kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa dan menjamin kepastian hukum dari sisi pembiayaan, pemerintah mengeluarkan UU No. 6 Tahun 2014, tepatnya pada pasal 72 ayat (2) bahwa desa akan memperoleh pembiayaan berupa alokasi APBN bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan dan besaran alokasi anggaran dari APBN yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap (Marselina, 2015).

Jika dilihat dari kriteria dan jenis transfer maka transfer Dana Desa (DD) termasuk dalam jenis transfer dengan tujuan umum karena sifatnya *unconditional*. Program dana desa merupakan kebijakan fiskal yang pengelolaannya bersifat otonom, dimana aparat desa selaku pengelola dana desa diberikan kewenangan dalam hal pemanfaatan (anggaran belanja) (Arham & Hasan, 2017). Dana Desa mulai diberlakukan sejak 2015 oleh pemerintah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada Pemerintah Desa bertujuan agar pemerintahan desa dapat meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten, dimana Dana Desa tersebut di alokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa yang berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan Undang – Undang mengenai Desa yaitu UU No. 6 Tahun 2014. Melalui dana desa, desa



ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom (Setianingsih, 2017).

#### 2.1.5.4 Prinsip Penggunaan Dana Desa

Menurut Kementerian Keuangan (2017), ada 6 (enam) prinsip penggunaan dana desa yang perlu menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan, diantaranya :

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda – bedakan. Dengan ini diharapkan timbulnya pemerataan antar masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

b. Prinsip Kebutuhan Prioritas

Prinsip ini pada dasarnya mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Dengan ini pemerintah desa dapat membuat program-program yang dinilai lebih penting didahulukan dengan melihat kondisi aktual dari desa.

c. Prinsip Kewenangan Desa

Prinsip ini lebih kepada mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

d. Prinsip Partisipatif

Prinsip ini mengedepankan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat. Pada hakikatnya lebih kepada pemberdayaan sumber daya manusia di desa, sehingga masyarakat akan lebih produktif dan mengasah kemampuan.

e. Prinsip Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa

Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.

f. Prinsip Tipologi Desa

Prinsip ini mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa

g. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 5 dan 6, Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

1) Peningkatan kualitas hidup

Diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

2) Peningkatan kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:

- a) Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan
- b) Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan
- c) Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin
- d) Meningkatkan pendapatan asli desa

3) Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk:

- a) Membiayai program penanggulangan kemiskinan
- b) Melakukan pemutakhiran data kemiskinan
- c) Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja
- d) Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin
- e) Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).

#### 4) Peningkatan pelayanan publik.

Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

### 2.1.6 Kemiskinan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004), mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki – laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan muncul dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya untuk meningkatkan kehidupan sosialnya. Keterbatasan itu bisa berasal dari sisi pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan lain – lain. Selain itu, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

*Head Count Index* (HCI-P<sub>0</sub>) digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk menunjukkan persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan atau mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Oleh karena itu, persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi (Badan Pusat Statistik, 2021).

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2018), berbagai faktor penyebab kemiskinan, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor kondisi alam dan lingkungan, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan bencana alam yang sering terjadi.
- b. Faktor penduduk, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan adanya migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan.
- c. Faktor eksploitasi yang terjadi antarkelas, antarkelompok, antarwilayah, dan antarnegara, termasuk adanya hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang.
- d. Faktor kelembagaan dan struktural seperti adanya berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan cenderung mengabaikan daerah perdesaan.
- e. Faktor teknologi yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas usaha tani atau pertanian, yang juga merupakan mata pencaharian utama dari mayoritas penduduk perdesaan termasuk di dalamnya penduduk miskin di negara berkembang.

Menurut Sangadji et al., (2015) kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks mencakup sosial – ekonomi, yang memiliki karakteristik utama yaitu rendahnya dan terbatasnya aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan baik pangan, sandang, papan maupun pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Hal ini memerlukan penanganan dan strategi khusus yang sesuai karakteristiknya agar angka kemiskinan yang begitu tinggi menjadi berkurang. Kemiskinan memiliki definisi yang luas, dan bukan hal yang mudah untuk mengukur kemiskinan. Terdapat beberapa ukuran kemiskinan yang umumnya digunakan, diantaranya yaitu :

- a. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural muncul dikarenakan unsur budaya disuatu daerah yang membuat masyarakat tidak bisa terlepas dari kemiskinan itu sendiri, yang

cenderung sulit untuk memperbaiki taraf hidup atau bisa dikatakan sebagai mentalitas kemiskinan. Selain itu, disebabkan pula oleh adanya adat, atau sifat dari para anggota masyarakat yang membuat mereka menjadi miskin. Pandangan hidup, nilai – nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat mendorong terwujudnya kemiskinan kultural. Ciri – ciri budaya miskin yaitu ketika keadaan masyarakat memiliki sistem perekonomian yang berorientasi pada mencari keuntungan, tingginya angka pengangguran, rendahnya upah yang diperoleh para pekerja, tidak adanya organisasi sosial, politik, dan ekonomi bagi kaum miskin yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh lembaga swadaya, adanya sistem kekeluargaan yang bilateral, dan adanya kelas masyarakat yang dominan menekankan pada penumpukan harta dan kekayaan, serta kesempatan untuk terus meningkat dalam status (*upward mobility*) (Palikhah, 2017).

#### b. Kemiskinan Struktural

Menurut Soemardjan et al., (1980) kemiskinan struktural terjadi karena adanya struktur sosial yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses sumber – sumber pendapatan yang tersedia untuk mereka. Masih terdapat kesenjangan pada penguasaan sumber – sumber daya ekonomi, yaitu didominasi oleh kelompok elit. Masyarakat tidak seluruhnya terlibat dalam pengambilan kebijakan sehingga menimbulkan kesenjangan dan terkadang terdapat aspek diskriminatif. Kemiskinan struktural akan berbeda sesuai dengan struktur sosial masyarakat dan pihak penguasa yang bermain. Masyarakat berada pada kondisi termarginalisasi dan dalam posisi struktur sosial yang timpang sehingga berada dalam kondisi miskin dan dimiskinkan. Kemiskinan struktural dapat berupa jenis pekerjaan sebagai petani/buruh tani dan pekerja informal, yang lebih memprioritaskan keseimbangan hidup dalam bermasyarakat, memiliki anggapan bahwa kebijakan pendidikan dirasa terlalu mahal, serta masih rendahnya partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.

#### c. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut dilihat dari keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan masyarakat lebih rendah dari standar hidup yang ditentukan. Kemiskinan absolut

dapat disebabkan karena adanya konflik, kesenjangan, kekerasan, kapasitas pemerintah yang terbatas, dan lain-lain.

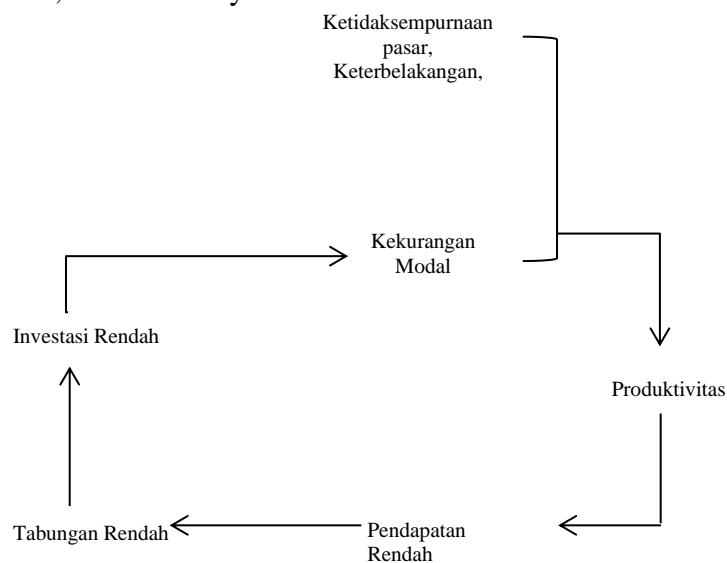
d. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diidentifikasi terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata, sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan (Wahyu, 2009). Ukuran standar minimum dilihat dari kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan berdasarkan pada golongan masyarakat termiskin.

Terdapat tiga paradigma terkait dengan akar penyebab kemiskinan, yaitu *pertama*, paradigma konservatif, memandang kemiskinan berasal dari karakteristik khas orang miskin, seperti tidak mau bekerja, boros, dan faktor internal lainnya. Jadi, kemiskinan disebabkan oleh budaya atau dikenal dengan kemiskinan kultural, kemiskinan ini dapat diatasi dengan pengembangan kelembagaan. *Kedua*, paradigma konvensional liberal memandang bahwa kemiskinan merupakan realitas dan adaptasi atas situasi lingkungan yang penuh diskriminasi dan sempit peluang, sehingga yang membedakan hanya pada posisi mereka yang kurang menguntungkan. Kemiskinan ini dapat diatasi dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama. *Ketiga*, paradigma radikal, yang menekankan peranan struktur ekonomi, politik, dan sosial. Kemiskinan terjadi karena sistem ekonomi dan politik yang memaksa untuk hidup miskin sehingga membawa persepsi bahwa orang menjadi miskin sebab di eksploitasi. Negara – negara menjadi miskin karena secara sistematis dimiskinkan (Yustika, 2009).

Suatu wilayah yang terjebak pada kemiskinan, terlebih lagi memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan yang sangat tinggi akan mengakibatkan peristiwa buruk atau faktor lain akan muncul, inilah yang terjadi dalam lingkaran kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Menurut Apriyanti & Hendarto (2011) lingkaran setan kemiskinan ini disebabkan oleh keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terciptanya tingkat pembentukan modal. Sedangkan pembentukan modal diperoleh dari tingkat tabungan. Menurut Nurkse (1953), ada dua jenis lingkaran

perangkap kemiskinan, yaitu dari sisi penawaran dan permintaan modal. *Pertama*, penawaran modal. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh produktivitas rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Pada akhirnya, tingkat pembentukan modal juga rendah. Efek dari pembentukan modal rendah adalah negara menghadapi kekurangan barang modal, implikasinya tingkat produktivitas tetap rendah. *Kedua*, permintaan modal. Di negara miskin keinginan untuk menanamkan modal rendah. Hal ini lebih disebabkan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Di samping itu, pendapatan masyarakat juga rendah yang diakibatkan produktivitas mereka rendah. Hal ini didukung pula oleh Kuncoro (1997) bahwa lingkaran kemiskinan juga didukung oleh keterbelakangan, pasar yang tidak sempurna, dan modal yang tidak mencukupi (yang menyebabkan produktivitas rendah). Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan yang akan diterima juga rendah. Pendapatan yang rendah dapat berpengaruh pada rendahnya tabungan dan investasi. Dengan demikian, ketika investasi lebih sedikit dapat menyebabkan pembangunan yang tidak merata, dan seterusnya.



Gambar 7. Lingkaran Kemiskinan Menurut Nurkse

Menurut Nurkse (1953), bahwa negara itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*). Berarti bahwa negara miskin karena tidak punya apa – apa, dan tidak punya apa – apa menyebabkan negara menderita kemiskinan. Menurut Suman (2007) ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh para sarjana untuk memotong lingkaran setan kemiskinan di Indonesia, yaitu :

- a. Menggali potensi kekayaan alam.
- b. Meningkatkan produktivitas kerja.
- c. Menggiatkan masyarakat untuk menabung.
- d. Memberikan pinjaman untuk modal usaha.

### 2.1.7 Pengangguran

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang langsung dirasakan dampaknya oleh manusia. Pengangguran mengakibatkan pelakunya mengalami tekanan psikologis, maka tidak asing lagi jika pengangguran menjadi tema yang selalu dibicarakan dalam forum politik maupun ekonomi dan politisi sering mengklaim, bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2006).

Menurut Sukirno (2000), pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut :

- a. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*), yaitu tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan.
- b. Pengangguran terselubung (*Disguised Unemployment*), yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu, tetap tidak mengurangi jumlah produksi.
- c. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*), yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu.

Untuk melihat tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan pada periode tahun tertentu, dapat diketahui melalui indikator pengangguran terbuka. Menurut BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengetahui besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.



### **2.1.8 Belanja Modal**

Menurut Kementerian Keuangan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan hasil studi Mukarramah et al., (2019) diperoleh bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Maka, semakin besar pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal dapat membantu menurunkan angka kemiskinan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.02/2011, ada beberapa klasifikasi belanja modal, diantaranya :

#### **2.1.8.1 Belanja Modal Tanah**

Seluruh pengeluaran yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah.

#### **2.1.8.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang akan digunakan untuk pelaksanaan beberapa kegiatan hingga peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

#### **2.1.8.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan, dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

#### **2.1.8.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai, dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

#### **2.1.8.5 Belanja Lainnya**

Pengeluaran yang diperlukan pada kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya diluar dari kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi dan lain-lain).

#### 2.1.8.6 Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional badan layanan umum.

### 2.1.9 Pendidikan

Menurut Todaro & Smith (2011), pendidikan adalah masukan (*input*) bagi fungsi produksi nasional dalam perannya sebagai komponen modal manusia (*human capital*), yang berarti investasi produktif dalam sumber daya manusia. Peningkatan pendidikan merupakan tujuan tersendiri yang penting sebagai upaya peningkatan pembangunan. Modal manusia berdampak langsung terhadap pendapatan dan pembangunan secara lebih luas, meningkatkan pengetahuan tentang cara bekerja demi memperoleh hasil yang lebih baik, dan kemampuan untuk berorganisasi, serta kemampuan memanfaatkan peluang seiring ekonomi tumbuh. Ketika seseorang menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi maka pengembalian pribadi yang diharapkan meningkat jauh lebih cepat daripada biaya pribadi. Menurut Badan Pusat Statistik (2019), indikator yang digunakan bagi dimensi pendidikan adalah rata – rata lama sekolah, digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam mengenyam pendidikan formal di suatu daerah. Rata – rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Indikator rata – rata lama sekolah dapat digunakan untuk evaluasi pelaksanaan program wajib belajar dan sebagai ukuran menghitung Indeks Pembangunan Manusia di sektor pendidikan.

Semakin tinggi rata – rata lama sekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dapat ditamatkan seseorang, sehingga semakin tinggi pula pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam mendorong peningkatan produktivitas kerja. Meningkatnya produktivitas mendorong bertambahnya pendapatan sehingga semakin besar kesempatan dan kemampuan seseorang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Masyarakat dengan pendidikan yang tinggi memiliki peluang yang kecil untuk masuk kedalam lingkaran kemiskinan (Sayifullah & Gandasari, 2016).

## 2.2 Tinjauan Empiris

Disajikan beberapa penelitian terdahulu yang pernah di teliti dalam membahas terkait dana desa, pengangguran, belanja modal, pendidikan, dan kemiskinan, dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Tinjauan Empiris

No.	Peneliti	Judul Jurnal	Pendekatan	Metode dan Variabel	Hasil
1.	M. Amir Arham dan Rauf Hatu (2020)	<i>Does Village Fund Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty? A Lesson from Indonesia.</i>	Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif	Metode analisis regresi data panel.  Variabel: Ketimpangan, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Rata-rata Lama Sekolah, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Produktivitas Tenaga Kerja di Sektor Pertanian, Kontribusi Sektor Industri terhadap Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dibidang Irigasi, Transfer Fiskal, Rata-rata Anggota Rumah Tangga, dan Inflasi	Tingkat kemiskinan pedesaan terus menurun. Namun, selama lima tahun, pelaksanaan transfer dana desa tidak signifikan untuk membantu memerangi ketimpangan. Transfer dana desa, bersama dengan dana hibah khusus, berperan signifikan dalam menekan angka kemiskinan.
2.	M. Amir Arham, dan Boby Rantow Payu (2019)	<i>Village Fund Transfer and Rural Poverty in Indonesia</i>	Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Analisis yang digunakan yaitu <i>statistik deskriptif</i>	Metode analisis regresi data panel.  Variabel : Tingkat Kemiskinan, PDRB Per kapita, Pembiayaan/Sektor Investasi Pertanian, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Alokasi Dana Desa, dan Tingkat Inflasi Daerah.	1. Transfer Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan pedesaan 2. Investasi atau pembiayaan sektor pertanian memiliki pengaruh yang kuat terhadap kemiskinan. Namun sebagian besar masih stimulan di sektor produksi.

3.	Nilam Indah Susilowati, Dwi Susilowati, dan Syamsul Hadi (2017)	Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Analisis yang digunakan yaitu <i>statistik deskriptif</i>	Metode analisis regresi data panel dengan model <i>Pooled</i> .  Variabel : Kemiskinan, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Belanja Modal , dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Hasil analisis regresi data panel dengan model yang terpilih adalah <i>Fixed Effect</i> Model menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota. Sedangkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0,99 atau 99%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto dalam menjelaskan kemiskinan desa adalah sebesar 99%.
4.	Dianti Lalira, Amran T. Nakoko, dan Ita Pingkan F.Rorong (2018)	Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud	Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.	Metode analisis regresi data panel  Variabel : Kemiskinan, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa	Hasil regresi Data Panel dengan model terpilih adalah <i>Random Effect</i> , dengan hasil olah data menunjukan nilai koefisien Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan bertanda sesuai teori akan tetapi tidak signifikan, yang artinya Variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di Kecamatan gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.
5.	Muh. Amir	Transfer Dana Desa	Pendekatan yang	Metode analisis regresi	Hasil penelitian

Arham, dan Yusrin Hasan	dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia	digunakan adalah pendekatan kuantitatif.	adalah data panel melalui pendekatan <i>fix effect model</i> .	menunjukkan bahwa transfer Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap pemerintah meningkatkan transfer dana desa maka akan mendorong penurunan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.
			Variabel :	
			Ketimpangan	
			Distribusi Pendapatan,	
			Pertumbuhan	
			Ekonomi, Jumlah	
			Penduduk, Tingkat	
			Kemiskinan, Indeks	
			Pembangunan	
			Manusia, Tingkat	
			Pengangguran, dan	
			Dana Desa	

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini merupakan gabungan dari ide – ide penelitian terdahulu yang di kumpulkan dan di perbaharui baik dari segi lokasi penelitian, waktu penelitian, dan variabel – variabel independen yang digunakan.

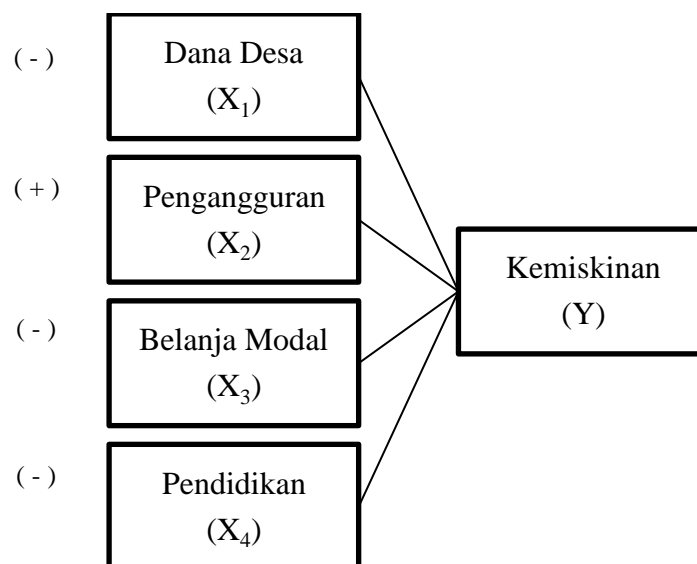
### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Kementerian Keuangan (2018), diperlukan peran pemerintah untuk menciptakan kestabilan dalam perekonomian, salah satunya melalui pengeluaran pemerintah melalui transfer dana desa. Menurut Fan et al., (2000) pengeluaran pemerintah tidak hanya berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi secara tidak langsung untuk pengentasan kemiskinan. Alokasi anggaran untuk dana desa diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program dana desa dapat diketahui melalui adanya perubahan pada kualitas hidup, kesejahteraan, tingkat kemiskinan, dan pelayanan publik. Program Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini sebagai implikasi dari fungsi alokasi APBN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Penurunan kemiskinan menjadi prioritas suatu negara pada setiap periode anggarannya. Masalah kemiskinan menjadi bagian penting dari tujuan dana desa

yaitu pembiayaan pada bidang pemberdayaan masyarakat, yang nantinya diharapkan dapat menumbuhkan sektor – sektor ekonomi dari desa untuk dapat membantu meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Penurunan kemiskinan dapat tercermin dari adanya penurunan tingkat pengangguran, perbaikan kondisi ekonomi, optimalisasi belanja modal, dan peningkatan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa program dana desa merupakan salah satu solusi untuk membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat, dan juga dengan melihat pada penurunan tingkat pengangguran, optimalisasi belanja modal, dan rata – rata lama sekolah. Dengan demikian, dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 8. Skema Kerangka Penelitian

## 2.4 Hipotesis

2.4.1 Diduga dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung, *ceteris paribus*.

- 2.4.2 Diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung, *ceteris paribus*.
- 2.4.3 Diduga belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung, *ceteris paribus*.
- 2.4.4 Diduga rata – rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung, *ceteris paribus*.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif inferensial yaitu untuk menganalisis dan mengetahui tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung berdasarkan variabel dana desa, pengangguran, belanja modal, dan rata – rata lama sekolah pada 13 kabupaten di Provinsi Lampung dengan menggunakan pengujian hipotesis dan analisis regresi sehingga dari hasil analisis tersebut dapat menarik kesimpulan atas penelitian ini.

#### **3.2 Populasi dan Waktu Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh pemerintah kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Jumlah pemerintahan kabupaten yang ada di Provinsi Lampung adalah sebanyak 15 pemerintahan yaitu Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung. Namun, penelitian ini hanya menggunakan 13 Kabupaten, dikarenakan Kota Bandar Lampung dan Kota Metro tidak termasuk Kabupaten/Kota yang mendapatkan transfer dana desa. Waktu penelitian tahun 2015 – 2019 dikarenakan program dana desa baru dimulai pada tahun 2015 hingga saat ini.



### 3.3 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dengan data deret waktu (*time series*) untuk tahun 2015 - 2019 dan data lintas individu (*cross section*) untuk 13 Kabupaten yang bersumber dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)), dan Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang mencakup data kemiskinan, dana desa, belanja modal, pengangguran, dan rata – rata lama sekolah pada tahun 2015 – 2019 yang diakumulasikan menjadi data panel. Penggunaan data panel dikarenakan keterbatasan data dana desa yang merupakan program baru pada tahun 2015, serta ingin mengetahui karakteristik dari masing – masing kabupaten yang menjadi wilayah analisis.

Tabel 7. Deskripsi Data

Variabel	Simbol	Periode	Satuan Ukuran	Sumber Data
Kemiskinan	KM	Tahunan	Persen	Badan Pusat Statistik
Dana Desa	LDD	Tahunan	Ribuan Rupiah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	Tahunan	Persen	Badan Pusat Statistik
Belanja Modal	LBM	Tahunan	Ribuan Rupiah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Rata – Rata Lama Sekolah	RLS	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

#### 3.4.1 Kemiskinan

Variabel ini menggunakan data persentase penduduk miskin. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dan untuk melihat persentase penduduk miskin menggunakan *Head Count Index* (HCI-P<sub>0</sub>), yang merupakan persentase penduduk

yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK) atau mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Oleh karena itu, persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan merupakan data sekunder dengan satuan persen periode tahunan dari tahun 2015 – 2019 di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung.

$$\text{Rumus perhitungan Head Count Index : } P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

Keterangan :

- $P_0$  : Persentase Penduduk Miskin
- $z$  : Garis Kemiskinan
- $y_i$  : Rata – rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
- $q$  : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- $n$  : Jumlah penduduk

### 3.4.2 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN disediakan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten, serta dikhususkan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Persentase Dana Desa dalam APBN sebesar 10 persen dari dan diluar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Formulasi pengalokasian Dana Desa terdiri dari Alokasi Dasar (69 persen), Alokasi Afirmasi (1,5 persen), Alokasi Kinerja (1,5 persen), dan Alokasi Formula (28 persen). Data ini diperoleh dari Rincian Dana Desa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan merupakan data sekunder dengan satuan ribuan rupiah periode tahunan dari tahun 2015 – 2019 di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung.

### 3.4.3 Pengangguran

Dalam penelitian ini pengangguran diwakili oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka tingkat pengangguran terbuka menggambarkan adanya penawaran tenaga kerja yang tidak terserap di suatu daerah tersebut. Sehingga, akan terlihat berapa persen jumlah penduduk yang menganggur dari total jumlah penduduk di suatu daerah. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan merupakan data sekunder dengan satuan persen periode tahunan dari tahun 2015 – 2019 di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung.

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

### 3.4.4 Belanja Modal

Menurut Kementerian Keuangan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai belanja modal dihasilkan dari akumulasi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigrasi, dan jaringan, belanja modal lainnya, dan belanja modal badan layanan umum. Data ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan merupakan data sekunder dengan satuan ribuan rupiah periode tahunan dari tahun 2015 – 2019 di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung.

### 3.4.5 Pendidikan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2019), indikator yang digunakan untuk dimensi pendidikan adalah rata – rata lama sekolah, merupakan metode baru yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam mengenyam pendidikan formal di suatu daerah sehingga memperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Rata – rata lama sekolah merupakan

jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Indikator rata – rata lama sekolah dapat digunakan untuk evaluasi pelaksanaan program wajib belajar dan sebagai ukuran menghitung Indeks Pembangunan Manusia di sektor pendidikan. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan merupakan data sekunder dengan satuan tahun periode tahunan dari tahun 2015 – 2019 di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung.

$$\text{Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Keterangan :

- RLS : Rata – rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas
- $x_i$  : Lama sekolah penduduk ke –  $i$  yang berusia 25 tahun
- $n$  : Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

### 3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda menggunakan regresi data panel, dengan menggunakan aplikasi olah data yaitu *Eviews 9* sebagai alat analisis. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel maka digunakan analisis statistik yaitu Analisis Regresi Data Panel, Uji Spesifikasi Model, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis.

#### 3.5.1 Simulasi dengan Menggunakan *Time Lag*

Penggunaan *time lag* untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat pada periode waktu tertentu. Prosedur simulasi dengan *time lag* akan berhenti ketika koefisien regresi dari variabel *lag* mulai menjadi tidak signifikan secara statistik atau koefisien dari setidaknya salah satu variabel berubah tanda dari positif ke negatif atau sebaliknya. Namun, panjang maksimum (*lag optimum*) harus ditentukan terlebih dahulu, dapat menggunakan kriteria *Akaike* atau *Schwarz* untuk memilih *lag length* yang sesuai (Gujarati & Porter, 2009). Dengan demikian, dalam penelitian ini menggunakan simulasi *time lag* untuk mengetahui periode waktu yang diperlukan variabel belanja modal untuk dapat mempengaruhi kemiskinan pada tahun penelitian 2015 – 2019.

### 3.5.2 Analisis Regresi Data Panel

Regresi Data Panel (*Panel Pooled Data*) adalah gabungan data *cross section* dan *time series* (Widarjono, 2018). Persamaan model dengan menggunakan data *cross section* sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 \text{Ln}X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \varepsilon_i \dots \dots \dots i = 1, 2, 3, \dots, N$$

di mana N adalah banyaknya data observasi. Sedangkan persamaan model dengan *time series* sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 \text{Ln}X_{3t-2} + \beta_4 X_{4t} + \varepsilon_t \dots \dots \dots t = 1, 2, 3, \dots, T$$

di mana T adalah banyaknya waktu.

Maka, persamaan regresi data panel dalam penelitian ini dalam bentuk *semi log (lin – log)* sebagai berikut :

$$KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LDD}_{1it} + \beta_2 \text{TPT}_{2it} + \beta_3 \text{LBM}_{3it-2} + \beta_4 \text{RLS}_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

$KM_{it}$	: Kemiskinan (dalam persen)
$\beta_0$	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	: Koefisien Regresi
$\text{LDD}_{1it}$	: <i>Log Natural</i> Dana Desa (dalam ribuan rupiah)
$\text{TPT}_{2it}$	: Tingkat Pengangguran Terbuka (dalam persen)
$\text{LBM}_{3it-2}$	: <i>Log Natural</i> Belanja Modal (dalam ribuan rupiah)
$\text{RLS}_{4it}$	: Rata – Rata Lama Sekolah (dalam tahun)
$\varepsilon_{it}$	: <i>error term</i>

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, antara lain: pendekatan *common effect*, pendekatan *fixed effects least square dummy variabel (LSDV)*, dan pendekatan *random effect* (Widarjono, 2018).

### 3.5.2.1 *Common Effect Model*

Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect* (Widarjono, 2018).

### 3.5.2.2 *Fixed Effect Model*

Model ini mengasumsikan adanya perbedaan intersep didalam persamaan regresi data panel. Dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep (Widarjono, 2018).

### 3.5.2.3 *Random Effect Model*

Metode *random effect* berasal dari pengertian bahwa variabel gangguan  $v_{it}$  terdiri dari dua komponen yaitu variabel gagguan secara menyeluruh  $e_{it}$  yaitu kombinasi *time series* dan *cross section* dan variabel gangguan secara individu  $e_{it}$ . Dalam hal ini variabel gangguan  $\mu_i$  adalah berbeda-beda antar individu tetapi tetap antar waktu (Widarjono, 2018).

## 3.5.3 Uji Spesifikasi Model

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk pemilihan model regresi data panel yang paling tepat, diantaranya :

### 3.5.3.1 Uji Spesifikasi Model dengan Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* lebih baik digunakan daripada model *common effect* :

$H_0$  : tidak ada beda      (*Common Effect*)

$H_a$  : ada beda              (*Fixed Effect*)

- a. Jika, nilai Chi squares hitung ( $\chi^2$ ) lebih kecil dari nilai kritis Chi squares ( $\chi^2$ ) maka model *common effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *fixed effect*.
- b. Jika, nilai Chi squares hitung ( $\chi^2$ ) lebih besar dari nilai kritis Chi squares ( $\chi^2$ ) maka model *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *common effect*.
- c. Jika, model yang terpilih adalah model *fixed effect* maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu Uji Hausman untuk mengetahui apakah lebih baik memakai *fixed effect model* atau *random effect model*.

### 3.5.3.2 Uji Spesifikasi Model dengan Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* lebih baik digunakan daripada model *random effect*. Hipotesis dalam Uji Hausman sebagai berikut:

$H_0$  : OLS tidak efisien      (*Random Effect*)

$H_a$  : OLS efisien      (*Fixed Effect*)

- a. Jika, nilai Chi squares hitung ( $\chi^2$ ) lebih kecil dari nilai kritis Chi squares ( $\chi^2$ ) maka model *random effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *fixed effect*.
- b. Jika, nilai Chi squares hitung ( $\chi^2$ ) lebih besar dari nilai kritis Chi squares ( $\chi^2$ ) maka model *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *random effect*.

### 3.5.3.3 Uji Spesifikasi Model dengan Uji BG – LM Test

Uji Breusch Pagan – Lagrange Multiplier Test digunakan untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik digunakan daripada model *common effect*.

$H_0$  : tidak ada beda      (*Common Effect*)

$H_a$  : ada beda      (*Random Effect*)

- a. Jika, nilai probabilitas Breusch Pagan lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima, jadi model yang tepat adalah *common effect* dibandingkan dengan model *random effect*.
- b. Jika, nilai probabilitas Breusch Pagan lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak, jadi model yang tepat adalah *random effect* dibandingkan dengan model *common effect*.

### 3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik sebagai salah satu prasyarat analisis pada regresi untuk menilai hasil regresi yang ada merupakan hasil estimasi yang terbaik dan layak untuk dianalisis.

#### 3.5.4.1 Uji Normalitas

Menurut Widarjono (2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual hasil regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian untuk mengetahui normalitas data melalui Uji Jarque-Bera, yang didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat *asymptotic*. Jika, residual terdistribusi normal maka nilai statistik Jarque-Bera akan sama dengan nol.

$H_0$  : Residu tersebar secara normal

$H_a$  : Residu tersebar tidak normal.

- a. Jika nilai probabilitas  $\rho$  dari statistik Jarque-Bera besar atau dengan kata lain jika nilai statistik dari Jarque-Bera tidak signifikan maka kita gagal menolak hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik Jarque-Bera mendekati nol (Widarjono, 2018).
- b. Jika nilai probabilitas  $\rho$  dari statistik Jarque-Bera kecil atau signifikan maka kita menolak hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik Jarque-Bera tidak sama dengan nol (Widarjono, 2018).



### 3.5.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Widarjono (2018) uji heteroskedastisitas terkait dengan variabel gangguan mempunyai varian yang tidak konstan atau heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah suatu model regresi mengandung unsur heteroskedastisitas atau tidak yaitu menggunakan metode *Glejser*, yaitu melakukan regresi nilai absolut dengan variabel independennya.

Kriteria pengujian heteroskedastisitas yaitu :

- a. Jika probabilitas  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  tidak signifikan secara statistik maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.
- b. Jika probabilitas  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  signifikan secara statistik maka dapat disimpulkan bahwa model mengandung masalah heteroskedastisitas.

### 3.5.4.3 Deteksi Multikolinieritas

Menurut Widarjono (2018) indikasi awal terjadi masalah multikolinieritas adalah apabila model regresi mempunyai *standard error* yang besar dan nilai statistik *t* yang rendah. Asumsi klasik menyatakan tidak ada hubungan *exact collinearity* antara variabel independen. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas yaitu menghitung *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil estimasi.

## 3.5.5 Pengujian Hipotesis

### 3.5.5.1 Uji t

Uji t merupakan suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol ( $H_0$ ), keputusan tersebut diperoleh dari data. Hal yang penting dalam hipotesis penelitian yang menggunakan data sampel dengan menggunakan uji t adalah masalah pemilihan apakah menggunakan dua sisi atau satu sisi (Widarjono, 2018). Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Dana Desa

$H_0 : \beta_1 \geq 0$ , Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung.

$H_a : \beta_1 < 0$ , Dana Desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung.

b. Pengangguran

$H_0 : \beta_2 \leq 0$ , Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung

$H_a : \beta_2 > 0$ , Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung

c. Belanja Modal

$H_0 : \beta_3 \geq 0$ , Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung

$H_a : \beta_3 < 0$ , Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung

d. Rata – Rata Lama Sekolah

$H_0 : \beta_4 \geq 0$ , Rata – Rata Lama Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung.

$H_a : \beta_4 < 0$ , Rata – Rata Lama Sekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung.

Keputusan untuk menolak atau gagal menolak  $H_0$  sebagai berikut :

- a. Jika, nilai  $t_0 >$  nilai  $t_\alpha$  maka  $H_0$  ditolak atau menerima  $H_a$ . Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap Kemiskinan.
- b. Jika, nilai  $t_0 <$  nilai  $t_\alpha$  maka  $H_0$  diterima atau menolak  $H_a$ . Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap Kemiskinan.

### 3.5.5.2 Uji F

Uji F merupakan uji signifikansi model dengan melakukan uji hipotesis secara bersama koefisien regresi (Widarjono, 2018). Formulasi uji statistik F dinyatakan sebagai berikut :

$$F = [R^2/(k - 1)] / [(1 - R^2)/(n - k)]$$

Keterangan :

- $R^2$  : Koefisien Determinasi  
 K : Jumlah Variabel Independen  
 N : Jumlah Sampel

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 \neq 0$$

Untuk mencari F hitung sesuai dengan rumus diatas dan nilai F kritis dari tabel distribusi F. Keputusan untuk menolak atau gagal menolak  $H_0$  sebagai berikut :

- Jika, nilai  $F_0 >$  nilai  $F_\alpha$  maka  $H_0$  ditolak atau menerima  $H_a$ . Artinya secara bersama – sama variabel independen berpengaruh terhadap Kemiskinan.
- Jika, nilai  $F_0 <$  nilai  $F_\alpha$  maka  $H_0$  diterima atau menolak  $H_a$ . Artinya secara bersama-sama variabel independen tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan.

### 3.5.5.3 Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan dalam regresi berganda untuk mengukur besaran proporsi dari total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh semua variabel independen. Nilai koefisien determinasi atau *R – Square* terletak antara 0 dan 1. Kriteria model yang baik adalah jika nilai  $R^2$  mendekati satu karena semakin mampu menjelaskan data aktualnya dan sebaliknya jika  $R^2$  mendekati 0 maka model kurang baik. Koefisien determinasi tidak pernah menurun dan semakin besar jika variabel independen terus ditambah ke dalam model regresi.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten di Provinsi Lampung pada tahun 2015 – 2019, artinya dengan memaksimalkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang terkait langsung ke masalah dasar di desa dapat menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten di Provinsi Lampung pada tahun 2015 – 2019, artinya tingginya tingkat pengangguran berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan rendahnya penggunaan tenaga kerja secara efisien, sehingga rentan hidup dibawah garis kemiskinan.
3. Belanja Modal dengan *lag* dua tahun berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten di Provinsi Lampung pada tahun 2015 – 2019, artinya belanja modal pada periode dua tahun akan mempengaruhi tingkat kemiskinan saat ini. Belanja modal dapat dioptimalkan untuk membantu meningkatkan layanan dasar publik dan mendorong tumbuhnya kegiatan – kegiatan ekonomi.
4. Rata – rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten di Provinsi Lampung pada tahun 2015 – 2019, artinya dengan meningkatkan tingkat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui jalur pendidikan setiap

orang dapat memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas, memperoleh pendapatan yang optimal, dan semakin banyak pilihan yang dapat dicapai untuk hidup lebih sejahtera, sehingga diharapkan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

5. Secara menyeluruh, dana desa, tingkat pengangguran terbuka, belanja modal, dan rata – rata lama sekolah mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Porsi alokasi anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan, dan dapat direalisasikan melalui kegiatan – kegiatan ekonomi produktif dan kreatif seperti menggerakkan UMKM secara swakelola, penyertaan modal ke BUMDES, kelompok wanita tani, dan melakukan efisiensi pembiayaan untuk sektor – sektor lain yang kurang produktif.
2. Diperlukan upaya kelembagaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Kabupaten, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memonitoring dan evaluasi penggunaan anggaran dana desa.
3. Diperlukan bimbingan teknis, pelatihan, dan sosialisasi kepada aparat desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penggunaan dan transparansi pelaporan anggaran dana desa.
4. Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak perbankan untuk mempermudah pengelolaan administrasi dan manajemen dana desa, dengan diberikan kemudahan persyaratan agar masyarakat mikro dapat mengakses tanpa hambatan khususnya untuk masyarakat pedesaan.
5. Pemerintah diharapkan dapat menggerakkan sektor riil produktif yang mampu menyerap tenaga kerja serta menyediakan kesempatan kerja yang luas, terutama pada bidang padat karya dan merata untuk seluruh golongan masyarakat, termasuk juga masyarakat yang digolongkan kedalam kriteria miskin. Sehingga, diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran.

6. Penggunaan belanja modal harus diarahkan untuk pengeluaran – pengeluaran pada bidang produktif yang mampu memberikan *multiplier effect* yang tinggi seperti penyediaan infrastruktur yang merata di setiap kabupaten, peningkatan konektivitas jalur logistik, serta menciptakan skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif.
7. Rata – rata lama sekolah harus ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi, melalui beberapa strategi seperti pengadaan unit sekolah baru, bantuan tunai untuk pendidikan masyarakat miskin, perbaikan pada kualitas pendidikan yaitu kualitas pengajaran, fasilitas pendidikan, dan kurikulum yang digunakan. Selain memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan lanjutan diiringi pula dengan menyediakan lapangan kerja yang lebih produktif bagi setiap orang yang terdidik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin.
8. Penanganan kemiskinan difokuskan pada daerah – daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi seperti Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Selatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Agenor, P. (2004). Unemployment Poverty Trade-Off. *World Bank Poverty Reduction and Economic Management Division*.
- Ambya. (2020). Transformasi Alokasi Dana Desa terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Wilayah Perdesaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 16–23. <https://doi.org/10.23960/jep.v9i1.84>
- Apriyanti, L., & Hendarto, M. (2011). Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008 - 2010). *Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro*.
- Arham, Muh. Amir, & Hasan, Y. (2017). Transfer Dana Desa dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *11(c)*, 363–367.
- Arham, Muh. Amir, & Hatu, R. (2020). Does Village Fund Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty ? A Lesson from Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 433–442. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.433>
- Arham, Muh. Amir, & Payu, B. R. (2020). Village Fund Transfer and Rural Poverty in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 8(4), 324–334. <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i4.31698>
- Astuti, Prihartini Budi. (2014). Efektifitas dan Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen 2009-2011. *Eko Regional FEB UNSOED*, 9(2), 89–101.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Profil Kemiskinan Makro Provinsi Lampung 2018*. Bandar Lampung : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Laporan Perekonomian Provinsi Lampung 2019*. Bandar Lampung : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase Penduduk Miskin (Headcount Index/P0). <<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/18>> [Diakses pada 24 Juni 2021].



- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). *Laporan Perkembangan Pencapaian Pembangunan Milenium Indonesia 2004*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Analisis Wilayah dengan Keiskinan Tinggi*. Jakarta: Kedeputusan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) Provinsi Lampung. (2017). *Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Lampung tahun 2018 - 2019*.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Lampung. (2018). *Menggali Akar Kemiskinan; Melihat Dari Dekat Kemiskinan di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah (2011-2015). *Media ekonomi dan Manajemen*, 33(1).
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. (2018). *Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI Ke Provinsi Lampung*.
- Djayasinga, Marselina. (2015). *Membedah APBD*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Fan, S., Hazell, P., & Thorat, S. (2000). Government Spending, Growth and Poverty in Rural India. *American Journal of Agricultural Economics*, 82(4), 1038–1051. <https://doi.org/10.1111/0002-9092.00101>.
- Faritz, M. N., & Soejoto, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(1).
- Fitriani, S., Haryono, D., Ismono, H., & Lestari, D. A. H. (2017). Pertanian Perdesaan Lampung: Peluang dan tantangan. *JoFSA (Journal of Food System & Agribusiness)*, 1(2), 43-52.
- Gujarati, Damodar N., & Porter, Dawn C. (2009). *Basic Econometric 5th Edition*. McGraw – Hill : New York.
- Hasanuddin, T., Trully G, D., & Endaryanto, T. (2009). Akar Penyebab Kemiskinan Petani Hortikultura di Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung. *Agrikultura*. <https://doi.org/10.24198/agrikultura.v20i3.947>

- Jaelani, A. (2018). Public Expenditure Management in Indonesia: Islamic Economic Review on State Budget 2017. *SSRN Electronic Journal*, 1, 1–14. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3185800>.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Universitas Lampung. (2018). *Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Lampung*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Postur APBN Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Serial Keuangan Daerah – Urgensi Keuangan Daerah. <<https://klc.kemenkeu.go.id/category/keuangan-publik/page/17/>> [Diakses pada 25 Juni 2021].
- Kusuma, Hendra. (2017). Flypaper Effect: Fiscal Illusion and Bureaucratic Model. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 9(1), 27–39. <https://doi.org/10.17977/um002v9i12017p027>
- Lalira, D., Nakoko, A., & Rorong, I. P. (2018). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 62–72.
- Mankiw, Gregory. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mangkoesebroto, Guritno. (1995). *Ekonomi Publik Edisi 3*. Yogyakarta : BPFE.
- Mardiana, M., Militina, T., & Utary, A. R. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan serta Infrastruktur terhadap Tingkat Pengangguran serta Tingkat Kemiskinan. *Inovasi*, 13(1), 50. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2437>
- Mizkan, H., Kamaliah, K., & Agusti, R. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Pekanbaru. *Sorot*, 10(1), 114. <https://doi.org/10.31258/sorot.10.1.3209>

- Mukarramah, Yolanda, C., & Zulkarnain, M. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 13.
- Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. S. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecoplan : Journal of Economics and Development Studies*, 2(2), 77–89. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v2i2.68>
- Nurkse, Ragnar (1953). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. New York: Oxford University Press.
- Palikhah, N. (2017). Konsep Kemiskinan Kultural. *Alhadharah*, 15(30), 1. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v15i30.1205>
- Pangestu, I. M. (2020). Fenomena Pekerja Miskin dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persentase Pekerja Miskin di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 62–74. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.26691>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Putro, P. B. W., Mintarti, S., & Wijaya, A. (2018). Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Inovasi*, 13(2), 135. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i2.2459>.
- Retnowati, Diah, & Harsuti. (2017). Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 6(1), 608–618.
- Sangadji, S., Abadi, T. W., & Fauziah, L. (2015). Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31(2), 495. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1563>
- Sari, I. M., & Faisal, A. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15 (1), 34.
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2).

- Sigit, Tri A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesia Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 296–311.
- Sendouw, A., Rumat, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–15. <https://doi.org/10.35794/jpekd.15780.19.2.2017>
- Setianingsih, Irma. (2017). Kontribusi Dana Desa dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi. *Magister Mahasiswa Ekonomi*, 5 No.3, 1–18.
- Seran, Sirilius. (2015). Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10, 59–71.
- Shiffa, F., & Raja, M. (2020). Analisis Infrastruktur Jalan, Listrik, Sekolah, dan PDRB terhadap Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 5(3), 175-183.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suman, A. (2007). Pemberdayaan Perempuan Kredit Mikro dan Kemiskinan: sebuah Studi Empiris. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 9(1), pp-62.
- Sunu, Made K. K., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8, 843–872.
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514–526.
- Soemardjan, S., Alfian, & Tan, Mely G. (1980). *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*. Jakarta : Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Todaro, Michael. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta : Erlangga.
- Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1*. Jakarta : Erlangga.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Wahyu R., Tri. (2009). Kemiskinan dan Bagaimana Memeranginya. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(7), 56–65.  
<https://doi.org/10.31942/akses.v4i7.514>
- Widarjono, Agus. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan Eviews Edisi Kelima*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Widianto, A., Sedyu, U., & Langgeng N, Asrofi. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus pada Kota Tegal). *Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, Vol. 5(No. 2), 170–176.
- Yustika, Ahmad Erani. (2009). *Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.